

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG TIKAR 1 KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik**

Oleh:

**TEGUH PRIANTORO
NIM. E1012181020**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG TIKAR 1 KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Jurusan Ilmu Administrasi**

Oleh:

**TEGUH PRIANTORO
E1012181020**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG TIKAR 1
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Tanggung Jawab Yudiris Pada:

TEGUH PRIANTORO
NIM. E1012181020

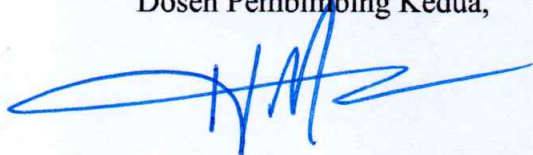
Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Pertama,



Dr. Azrita Mardhalena, M. Si
NIP. 196103031987102001

Dosen Pembimbing Kedua,



Dr. Arifin, M. AB
NIP.197105021997021002

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG TIKAR 1
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Oleh:
TEGUH PRIANTORO
NIM. E1012181020**

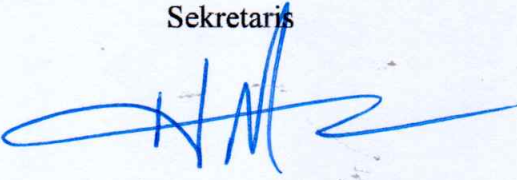
Dipertahankan di : Pontianak.
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 21 Januari 2025
Waktu : 13.00 – 14.30 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Fisip Untan/Ruang Sidang 2.

Tim Penguji

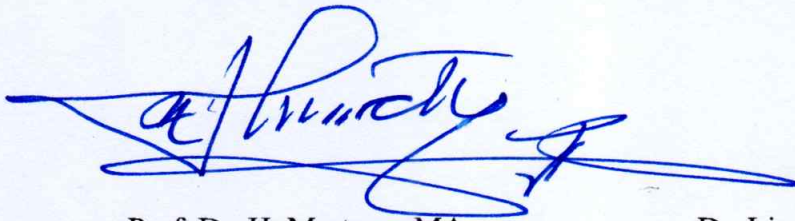
Ketua


Dr. Azrita Mardhalena, M. Si
NIP. 196103031987102001

Sekretaris


Dr. Arifin, M. AB
NIP.197105021997021002

Penguji Utama


Prof. Dr. H. Martoyo, MA
NIP. 196010031986031004

Penguji Pendamping


Dr. Lina Sunyata, M. Si
NIP.196111111987032002

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan



Dr. Herlan, S. Sos, M. Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Teguh Priantoro (E1012181020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. **Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura 2024.**

Implementasi bantuan PKH bagi anak sekolah di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan menyesuaikan terhadap regulasi yang telah diterapkan pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang ada di negara maju dan berkembang untuk dapat diselesaikan secara bersama dalam forum internasional sehingga ini menarik untuk diteliti. Penelitian berfokus pada PKH salah satu solusi dalam mengurangi kemiskinan dengan sasaran kebijakan untuk anak sekolah. Penelitian ini disusun secara kualitatif dengan penelitian deskriptif serta menggunakan data primer berupa wawancara, kemudian teori yang digunakan adalah teori Van Meter dan Van Horn, dapat ditinjau dari enam faktor seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, lingkungan (ekonomi, sosial, dan politik), dan sikap para pelaksana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PKH dengan sasaran anak sekolah masih belum berjalan maksimal karena lemahnya pendampingan atau pengawasan kepada keluarga penerima manfaat PKH. Selain itu lemahnya komunikasi antara Koordinator PKH dan pihak sekolah menyebabkan beberapa siswa atau siswi penerima bantuan PKH menganggap sepele kehadiran sehingga sikap ini jelas berpengaruh terhadap proses akademik yang sedang dijalani. Situasi seperti yang sudah dijelaskan harus segera diperbaiki sehingga keluarga penerima manfaat PKH dapat menjalankan kewajibannya sebaik mungkin sesuai dengan aturan dan tujuan dari PKH dapat tercapai. Sebagai saran, membangun kembali komunikasi dengan pihak sekolah terkait pengawasan terhadap siswa atau siswi penerima bantuan PKH.

Kata Kunci: PKH, Kemiskinan, Implementasi.

ABSTRACT

Teguh Priantoro (E1012181020). Implementation of the Family Hope Programme (PKH) in Poverty Reduction in Padang Tikar 1 Village, Batu Ampar District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province. **Thesis. Department of Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University 2024.**

The implementation of PKH assistance for school children in Padang Tikar 1 Village, Batu Ampar District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province by adjusting to the regulations that have been implemented by the Indonesian government. This study aims to analyse the factors that influence the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in poverty reduction in Padang Tikar 1 Village, Batu Ampar District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province. Poverty is one of the problems that exist in developed and developing countries to be resolved together in international forums so that this is interesting to research. The research focuses on PKH, one of the solutions in reducing poverty with policy targets for school children. This research is structured qualitatively with descriptive research and uses primary data in the form of interviews, then the theory used is the theory of Van Meter and Van Horn, which can be viewed from six factors such as policy standards and objectives, resources, inter-organisational communication and strengthening activities, characteristics of implementing agents, environment (economic, social, and political), and attitudes of implementers. The results of this study indicate that the implementation of the PKH policy targeting school children is still not running optimally due to weak assistance or supervision to PKH beneficiary families. In addition, the weak communication between the PKH Coordinator and the school causes some students or students receiving PKH assistance to take attendance lightly so that this attitude clearly affects the academic process being undertaken. Situations such as those described must be corrected immediately so that PKH beneficiary families can carry out their obligations as well as possible in accordance with the rules and the objectives of PKH can be achieved. As a suggestion, re-establish communication with the school regarding the supervision of students receiving PKH assistance.

Keyword : PKH, Poverty, Implementation



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat”. Judul ini dipilih karena meninjau apakah PKH sudah di optimalkan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Padang Tikar 1. Hasil peninjauan PKH untuk sasaran anak sekolah masih belum dijalankan secara optimal karena adanya beberapa kendala yang terjadi. Pendampingan atau pengawasan kepada keluarga penerima manfaat PKH belum maksimal lalu permasalahan komunikasi antara pihak Koordinator PKH dan Sekolah yang belum maksimal. Permasalahan ini dikhawatirkan dapat berpengaruh kepada keluarga penerima manfaat PKH dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendapat dari Van Meter dan Van Horn dalam melihat proses implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor atau variabel yang saling berkaitan yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, lingkungan (ekonomi, sosial, dan politik), dan sikap para pelaksana. Menggunakan faktor-faktor tersebut maka penulis melakukan analisis terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar masih belum memaksimalkan komunikasi kepada pihak sekolah. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak sekolah selaku pihak yang berkaitan dengan PKH untuk anak sekolah. Keterangan yang didapatkan dari pihak sekolah mengindikasikan bahwa Koordinator PKH belum maksimal dalam mengawasi atau mendampingi keluarga penerima manfaat PKH untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian pihak Koordinator juga tidak melanjutkan rekapan absen dari siswa atau siswi yang menerima bantuan PKH. Dampak dari lemahnya pengawasan tersebut mengakibatkan beberapa siswa atau siswi menganggap sepele kehadiran di sekolah, situasi ini tentunya dapat menghambat jalannya proses akademik sehingga dapat berpengaruh terhadap kewajiban bagi penerima keluarga penerima manfaat PKH.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya pihak Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar memperbaiki sistem pendampingan atau pengawasan kepada keluarga penerima manfaat PKH terutama yang mendapatkan bantuan bagi anak sekolah. Kemudian membangun kembali komunikasi dengan pihak sekolah terkait pengawasan terhadap siswa atau siswi penerima bantuan PKH. Saran yang diberikan ini dapat mempengaruhi keberlangsungan kebijakan PKH, karena bantuan kepada anak sekolah cukup panjang dan berhubungan dengan kebijakan wajib belajar selama 12 tahun

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Teguh Priantoro

Nomor Mahasiswa : E1012181020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya asli dari saya sendiri dan bukan dibuat oleh orang lain serta belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi, Fakultas atau Perguruan Tinggi yang lain, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain atau instansi lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan saya sebutkan dalam daftar pustaka skripsi ini.

Pontianak, 21 Januari 2025

Membuat Pernyataan



Teguh Priantoro

E1012181020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Disiplin adalah jembatan di antara tujuan dan prestasi, disiplin adalah perbedaan antara apa yang kamu inginkan sekarang dan yang paling kamu inginkan, disiplin yang kamu pelajari dan karakter yang kamu bangun dari menata dan meraih suatu tujuan dapat lebih bernilai dari pada pencapaian tujuan itu sendiri.”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang yang paling berharga dalam hidup saya yang telah membesarkan, menyayangi dan merawat saya serta selalu percaya dan mendukung saya dalam menggapai apa yang saya cita-citakan.
2. Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah membantu dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atau rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penulisan skripsi yang berjudul : **‘Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat’** ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Herlan, S. Sos, M. Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Azrita Mardhalena, M. Si Selaku Pembimbing Utama, dan Dr. Arifin, M. AB Selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini, baik secara metodologi penelitian serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. Martoyo, MA Selaku Penguji Pertama dan Dr. Lina Sunyata, M. Si Selaku Penguji Kedua yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
4. Dr. Lina Sunyata, M. Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.

5. Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
6. Kelurahan Desa Padang Tikar 1 beserta staf dan PKBM di Kelurahan Desa Padang Tikar 1 serta Tokoh Masyarakat di Kelurahan Desa Padang Tikar 1 yang menjadi informan pada penelitian ini yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi pendukung yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh mahasiswa FISIP Untan angkatan 2018 yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari ALLH SWT, dan hasil karya yang penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya Amin.

Pontianak, Januari 2025

Teguh Priantoro
E1012181020

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
RINGKASAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian	14
1.3 Fokus Penelitian	14
1.4 Rumusan Masalah	14
1.5 Tujuan Penelitian	15
1.6 Manfaat Penelitian	15
1.6.1 Manfaat Teoritis	15
1.6.2 Manfaat Praktis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Teori	16
2.1.1 Kebijakan Publik	16
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik	26
2.1.3 Proses Implementasi Kebijakan Publik	33
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan	46
2.3 Kerangka Pikir	48
2.4 Pertanyaan Penelitian	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	51
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	52
3.4 Instrumen Penelitian	52
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	53
3.6 Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)	54
3.7 Teknik Analisa Data	55
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	56
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kubu Raya	56
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Batu Ampar	58
4.3 Gambaran Umum Desa Padang Tikar 1	60
BAB V IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG TIKAR 1 KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	62
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian	62
5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa	

Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat	66
5.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan	66
5.2.2 Sumber Daya	72
5.2.3 Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas	75
5.2.4 Karakteristik Agen Pelaksana.....	80
5.2.5 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.....	83
5.2.6 Sikap Para Pelaksana.....	87
BAB VI PENUTUP	90
6.1 Simpulan.....	90
6.2 Saran.....	91
6.3 Keterbatasan Penelitian	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Grafik Kemiskinan Negara ASEAN Tahun 2022	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Desa Padang Tikar 1 Tahun 2024.....	8
Tabel 1.3.	Jumlah Masyarakat Miskin Desa Padang Tikar 1 Tahun 2024..	9
Tabel 1.4.	BPNT PKH Desa Padang Tikar 1 Tahun 2020 s/d 2024.....	10
Tabel 1.5.	Jumlah Bantuan Non PKH Desa Padang Tikar 1 Tahun 2024..	11
Tabel 2.1	Tabel Penelitian Yang Relevan	47
Tabel 3.1	Rencana jadwal pelaksanaan penelitian	51
Tabel 4.1	Riwayat Pendidikan PNS Kabupaten Kubu Raya	57
Tabel 4.2	Riwayat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Batu Ampar	59
Tabel 4.3	Riwayat Pendidikan Masyarakat Desa Padang Tikar 1.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	49
------------	---------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Wawancara Kecamatan Batu Ampar.....	96
Lampiran 2.	Kantor Kecamatan Batu Ampar	100
Lampiran 3.	Wawancara Desa Padang Tikar 1	100
Lampiran 4.	Kantor Desa Padang Tikar 1.....	101
Lampiran 5.	Wawancara Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar	101
Lampiran 6.	Kantor Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar.....	101
Lampiran 7.	Wawancara Penerima Manfaat PKH.....	102
Lampiran 8.	Wawancara Sekolah MB. AL – IHSAN.....	102
Lampiran 9.	Sekolah MB. AL – IHSAN	102
Lampiran 10.	Surat Izin Penelitian Kantor Kecamatan Batu Ampar.....	103
Lampiran 11.	Surat Tugas Penelitian Kantor Kecamatan Batu Ampar	104
Lampiran 12.	Surat Izin Penelitian Kantor Desa Padang Tikar 1	105
Lampiran 13.	Surat Tugas Kantor Desa Padang Tikar 1	106
Lampiran 14.	Surat Persetujuan Melaksanakan Penelitian	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan rumit yang dialami hampir oleh setiap negara berkembang dan maju. Menurut Yacoub (2012: 1), menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasar hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan karena keterbatasan sumber daya. Selain kebutuhan pokok yang belum tercukupi, tempat tinggal dan pakaian yang tidak layak juga menjadi indikator tambahan masyarakat miskin. Beberapa faktor secara internal dan eksternal menjadi penyebab adanya kemiskinan. Faktor secara internal yang memengaruhi kemiskinan antara lain keterampilan diri serta pendidikan di bawah standar, kurang mampunya mengakses pekerjaan dan penyakit. Sedangkan faktor secara eksternal yang memengaruhi kemiskinan antara lain perang, korupsi dan bencana alam. Keterkaitan beberapa aspek dalam masalah kemiskinan menjadikan kemiskinan begitu rumit untuk diselesaikan serta memiliki dampak yang begitu luas di ekonomi, sosial maupun politik.

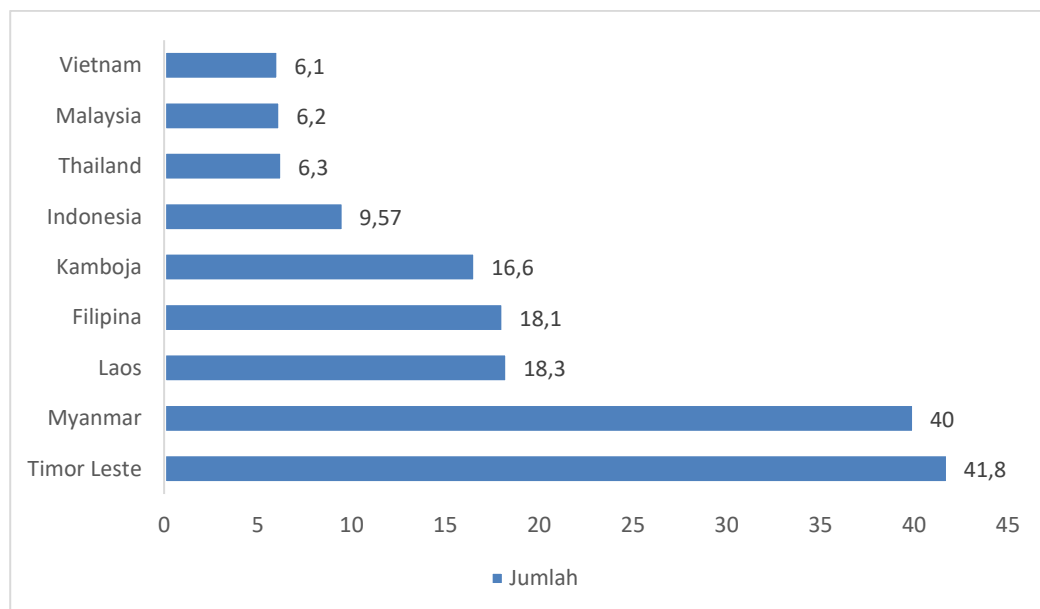
Dampak kemiskinan secara ekonomi dapat menyebabkan menurunnya produktivitas, pertumbuhan ekonomi lambat dan ketimpangan yang meningkat. Kemudian dampak kemiskinan secara sosial seperti diskriminasi, kekerasan dan

konflik. Dampak kemiskinan terakhir yang cukup penting serta dapat berpengaruh bagi stabilitas negara yaitu dampak kemiskinan secara politik seperti korupsi, oligarki dan tirani. Permasalahan rumit yang ditimbulkan oleh kemiskinan menjadikan kemiskinan sebagai program utama untuk diselesaikan di setiap negara. Hal terkait kemiskinan bahkan di bahas dalam forum international seperti *United Nations* atau yang lebih dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kemiskinan didalam forum *United Nations* menjadi permasalahan pertama untuk diselesaikan, hal ini berdasarkan dokumen yang disajikan oleh *United Nations* (2023: 1) menyatakan bahwa: “*Eradicating extreme poverty for all people everywhere by 2030 is a pivotal goal of the 2030 Agenda for Sustainable Development*” (memberantas kemiskinan ekstrem bagi semua orang di mana pun pada tahun 2030 adalah tujuan penting Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030). Diskusi yang berkaitan dengan mencari solusi dari menghentikan kemiskinan melibatkan semua sektor untuk ikut berkontribusi. Pemerintah sebagai eksekutif sekaligus pemegang kekuasaan dalam mengelola negara dituntut untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pemerintah juga harus mampu untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam meningkatkan produktivitas sehingga perekonomian negara menjadi lebih baik. Sektor sains juga ikut berperan seperti memberikan akses air yang aman sehingga tidak adanya penyebaran penyakit melalui air merupakan salah satu contoh kontribusi dari bidang sains dalam mengurangi angka kemiskinan.

Isu kemiskinan bukan hanya menjadi fokus di forum global tetapi juga menjadi fokus di forum regional salah satunya adalah *The Association of Southeast*

Asian Nations (ASEAN). Program ASEAN sejalan dengan program *United Nations* untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Negara ASEAN didominasi oleh negara berkembang dengan tingkat kemiskinan diatas 5%. Berdasarkan data yang dirilis oleh DataIndonesia, Tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2022 dimiliki oleh Timor Leste dengan angka yaitu 41,8% dan yang terendah dimiliki oleh Vietnam dengan angka yaitu 6,1%. Perbedaan angka yang cukup signifikan terus mendorong ASEAN untuk saling bekerjasama dalam meningkatkan perekonomian negara sehingga angka kemiskinan di ASEAN dapat menurun setiap tahunnya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan daerah yang luas terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Tercatat ditahun 2022, Indonesia diantara negara ASEAN memiliki angka kemiskinan sebesar 9,57%.

Tabel 1.1 Grafik Kemiskinan Negara ASEAN Tahun 2022



Sumber: *DataIndonesia.id*, 2023

Indonesia sebagai negara yang masih memiliki penduduk tergolong dalam kemiskinan terus berupaya serius untuk mengurangi angka kemiskinan setiap

tahunnya. Kemiskinan merupakan salah satu masalah publik yang harus segera diselesaikan dengan beberapa kebijakan publik. Beberapa kebijakan publik menjadi sebuah program kerja dari pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan secara langsung dan tidak langsung seiring dengan pertumbuhan populasi masyarakat Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan salah satunya dapat terlihat dari pembentukan Kementerian Sosial. Kementerian Sosial bertugas sebagai penyelenggara semua urusan pemerintah dalam bidang sosial, hal ini dipertegas dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial pada Bab I pasal 2. Kementerian Sosial menjalankan tugas dalam menangani masalah sosial di Indonesia dengan beberapa program kerja, salah satu program kerjanya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Indonesia mulai menjalankan PKH sejak tahun 2007 dengan dasar dan landasan hukum yaitu UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Menurut Permensos No. I Tahun 2018 Program Keluarga Harapan pada Bab 1 pasal 1 menjelaskan Program Keluarga Harapan adalah “Program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin atau rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM)”. Penerapan salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan diharapkan dapat terus berjalan beriringan dengan program-program lainnya sehingga kemiskinan di Indonesia dapat terus menurun.

Program-program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia memiliki dampak dalam menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data yang dirilis oleh

Badan Pusat Statistik Indonesia (2022: 11) menjabarkan jumlah penduduk Indonesia yang miskin terdiri dari masyarakat di perkotaan dan pedesaan pada Maret 2022 berjumlah 26,16 juta jiwa (9,54%), mengalami penurunan disbanding dengan bulan Maret 2021 sebesar 27,54 juta jiwa (10,14%). Penurunan ini salah satunya dipengaruhi oleh program pemerintah yaitu PKH. Pada 2021, PKH dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah rumah tangga miskin yang memiliki ibu hamil, menyusui, anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, memiliki anak SD, SMP, SMA, memiliki lansia dan disabilitas. PKH bertujuan meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat pencegahan dan bukan pengobatan. Selain itu adanya upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi program wajib belajar selama 12 tahun dan upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang kurang mampu. Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki regulasi yang jelas dalam penerapannya. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berubah menyesuaikan kondisi negara. Regulasi terbaru yang mengatur penyelenggaraan PKH tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 02/3/BS.02.01/01/2020 Tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 2020. Regulasi terbaru memuat beberapa aturan yang mengatur batas bantuan penerima serta komponen penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Regulasi terbaru yang dikeluarkan Kementerian Sosial PKH menjelaskan bantuan maksimal empat orang dalam satu keluarga. Kemudian penerima PKH terdiri dari dua komponen yaitu

komponen pertama meliputi ibu hamil, anak usia dini, lansia, dan disabilitas. Komponen kedua meliputi bantuan pendidikan keluarga PKH bagi anak usia sekolah SD hingga SMA.

Menurut Najidah dkk (2019:2), bantuan Program Keluarga Harapan merupakan perwujudan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat miskin dan sebagai komitmen dari pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Sasaran dari Program Keluarga Harapan yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial ini fokus pada bidang kesehatan dan pendidikan. Pendidikan anak-anak menjadi perhatian dari bantuan PKH karena anak-anak merupakan calon penerus bangsa. Penerima PKH diberikan beberapa syarat serta kriteria yaitu terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi komponen persyaratan sebagai peserta PKH. Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) diukur berdasarkan prinsip 4T, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat administrasi. Menurut Hia (2021: 2), prinsip 4T dinilai cukup penting karena sebagai indikator bahwa bantuan Program Keluarga Harapan dapat mencapai tujuannya, yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Prinsip tepat sasaran dalam bantuan Program Keluarga Harapan dapat berjalan baik jika data mengenai masyarakat miskin benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan. Pembagian bantuan Program Keluarga Harapan juga harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat miskin dapat segera memenuhi kebutuhannya tanpa harus menunggu beberapa minggu bahkan beberapa bulan untuk mendapatkan bantuan. Selain waktu yang harus tepat dalam penerapan PKH, jumlah dari bantuan PKH juga mesti tepat sesuai dengan Undang-Undang tanpa adanya potongan. Kemudian tepat administrasi untuk

memastikan bahwa proses penyaluran bantuan PKH dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Seluruh regulasi terkait bantuan Program Keluarga Harapan berlaku untuk seluruh daerah Indonesia tanpa terkecuali. Kebijakan publik mengenai bantuan Program Keluarga Harapan ini secara tidak langsung juga dapat diawasi praktiknya diseluruh wilayah Indonesia karena kesamaan regulasinya. Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah lokasi pelaksanaann Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai pada tahun 2010, dimana pada saat itu yang mendapat alokasi yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Landak. Alokasi dana bantuan Program Keluarga Harapan terus meluas dari tahun ke tahun ke berbagai daerah Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu daerah penerima bantuan Program Keluarga Harapan yaitu Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya (2023: 5,64), Kabupaten Kubu Raya memiliki luas wilayah sebesar 8.492,1 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 622.217 jiwa di periode tahun 2022. Memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang cukup banyak, Kabupaten Kubu Raya masih memiliki masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berupaya maksimal dalam mengurangi kemiskinan di Sembilan kecamatan. Bantuan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya dirasakan cukup efektif sehingga angka kemiskinan setiap tahunnya menurun. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya (2023: 168), tercatat bahwa angka kemiskinan di tahun 2021 memiliki persentase sebesar 4,34% sedangkan ditahun 2022 turun menjadi 4,12%, hal ini membuktikan upaya pemerintah untuk mengatasi

kemiskinan dinilai cukup efektif dengan beberapa program bantuan, salah satunya bantuan Program Keluarga Harapan.

Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa Kecamatan dan Desa yang tersebar luas. Salah satu Kecamatan dan Desa yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan yaitu Kecamatan Batu Ampar. Kecamatan Batu Ampar merupakan wilayah produktif dalam menghasilkan produk pertanian berupa kelapa yang kemudian diolah menjadi kopra. Selain aktif menghasilkan kopra sebagai komoditi ekspor, masyarakat Kecamatan Batu Ampar juga berprofesi sebagai nelayan dan peternak. Salah satu desa di wilayah Kecamatan Batu Ampar yang tergolong produktif yaitu Desa Padang Tikar 1 dengan jumlah penduduk sebanyak 4.297, data jumlah penduduk bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (2023: 5).

Tabel 1.2.

Jumlah Penduduk Desa Padang Tikar 1 Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024

Jenis Kelamin		Total
Laki – Laki	Perempuan	
2.119 Orang	2.178 Orang	4.297 Orang

Sumber : Kantor Desa Padang Tikar 1 2024

Berdasarkan Tabel 1.2. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Desa Padang Tikar 1 tercatat sebanyak 4.297 orang. Penduduk tersebut terdiri dari 2.119 orang laki-laki dan 2.178 orang perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan di desa ini sedikit lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Desa Padang Tikar 1, meskipun memiliki wilayah yang produktif dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan di beberapa golongan penduduknya. Kelompok masyarakat miskin ini terdiri dari keluarga yang memiliki keterbatasan dalam akses

ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Mereka cenderung kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, terutama pangan, pendidikan anak, dan perawatan kesehatan.

Tabel 1.3.

Jumlah Masyarakat Miskin Desa Padang Tikar 1
Tahun 2024

Jenis Kelamin		Total
Laki – Laki	Perempuan	
180 Orang	217 Orang	397

Sumber : Kantor Desa Padang Tikar 1 2024

Berdasarkan tabel 1.3. Pada tahun 2024, jumlah masyarakat miskin di Desa Padang Tikar 1 tercatat sebanyak 397 orang, terdiri dari 180 laki-laki dan 217 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan miskin lebih banyak dibandingkan laki-laki. Meskipun program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), telah diberikan untuk membantu masyarakat kurang mampu, tidak semua masyarakat miskin di desa ini mendapatkan bantuan tersebut. Sebagian lainnya menerima bantuan non-PKH yang juga disalurkan oleh pemerintah atau pihak terkait, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan program sosial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara bertahap.

Pengelolaan dari implementasi bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Padang Tikar 1 telah terealisasi sebanyak 236 kepala rumah tangga. Bantuan Program Keluarga Harapan terealisasikan sesuai dengan komponen masyarakat yang berhak menerimanya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tercatat dalam data penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Padang Tikar 1 terdapat 1 golongan yang banyak mendapatkan yaitu anak sekolah dari semua jenjang. Golongan ini banyak mendapatkan manfaat dari bantuan Program

Keluarga Harapan karena jumlah penerimanya terdiri dari tiga jenjang pendidikan seperti SD, SMP dan SMA serta durasi penerimaan bantuan. Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang disalurkan kepada anak sekolah seperti SD, SMP dan SMA berjumlah 193 penerima.

Tabel 1.4.

Bantuan Non Tunai PKH Desa Padang Tikar 1
Tahun 2020 s/d 2024

No	Kategori	Jenis	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pendidikan SD / SMP / SMA	Rasta	170	184	189	190	193
2	Ibu Hamil & Menyusui	Rasta	35	30	36	37	40
3	Lanjut Usia	Rasta	10	7	6	4	4
Grand Total			215	221	231	231	237

Sumber : Kantor Desa Padang Tikar 1 2024

Berdasarkan Tabel 1.4. Bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) berupa Beras Sejahtera (Rasta) di Desa Padang Tikar 1 mengalami peningkatan jumlah penerima dari tahun 2020 hingga 2024. Penerima dari kategori tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA meningkat secara konsisten, dari 170 orang pada tahun 2020 menjadi 193 orang pada tahun 2024. Kategori ibu hamil dan menyusui juga menunjukkan peningkatan, dari 35 orang pada tahun 2020 menjadi 40 orang pada tahun 2024. Sementara itu, kategori lanjut usia mengalami penurunan, dari 10 orang pada tahun 2020 menjadi 4 orang pada tahun 2024. Total penerima meningkat dari 215 menjadi 237 dalam lima tahun terakhir.

Adapun masyarakat miskin Desa Padang Tikar 1 yang tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akan tetapi mendapatkan bantuan Non Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut :

Tabel 1.5.

Jumlah Bantuan Non PKH Desa Padang Tikar 1
Tahun 2024

No	Kategori	Keterangan	Total
1	Bantuan Non PKH	Tersalurkan	10
2	Bantuan Non PKH	Belum Tersalurkan	112
Grand Total			122

Sumber : Kantor Desa Padang Tikar 1 2024

Berdasarkan Tabel 1.4. Pada tahun 2024, Desa Padang Tikar 1 mencatat penyaluran bantuan non-PKH dengan total sebanyak 122 bantuan yang dialokasikan untuk masyarakat miskin. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 bantuan telah berhasil tersalurkan kepada penerima, sementara 112 bantuan lainnya masih dalam proses dan belum tersalurkan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyaluran bantuan non-PKH secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan, langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil untuk memastikan bantuan tersebut dapat diterima oleh semua penerima yang memenuhi syarat, guna membantu meringankan beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Hasan (2017:3), menjelaskan bagaimana bantuan Program Keluarga Harapan secara tidak langsung mendukung program Kementerian Pendidikan untuk membuat anak-anak di semua jenjang pendidikan yang masih berada dalam kemiskinan dapat terus melanjutkan pendidikannya selama 12 tahun. Selain itu dengan adanya bantuan ini membuat anak-anak tidak perlu bekerja sehingga mengakibatkan putus sekolah. Pentingnya pendidikan dapat menjadi pendukung Indonesia terlepas dari kemiskinan serta membentuk pola pikir, norma dan sikap yang baik kedepannya. Melalui pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Pendidikan juga dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, sanitasi, dan perencanaan keluarga, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dari jumlah bantuan Program Keluarga Harapan, mengindikasikan bahwa anak sekolah menjadi salah satu komponen bagi mendapatkan bantuan PKH seperti ibu hamil, anak usia dini, lansia Indonesia untuk terlepas dari kemiskinan tanpa mengesampingkan golongan lain yang dan disabilitas.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial tunai yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. PKH memiliki tiga komponen utama, yaitu Komponen Kesehatan, Komponen Pendidikan, dan Komponen Kesejahteraan Sosial. Komponen Kesehatan memberikan bantuan untuk ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun sebesar Rp 3.000.000 per tahun. Komponen Pendidikan memberikan bantuan untuk anak usia SD, SMP, dan SMA, mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 2.000.000 per tahun. Komponen Kesejahteraan Sosial memberikan bantuan untuk disabilitas berat dan lansia 70 tahun ke atas sebesar Rp 2.400.000 per tahun (<https://kemensos.go.id/>) .

Selain PKH, ada juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang merupakan bantuan sosial nontunai yang diberikan kepada KPM. Jenis bantuan sosial lainnya yang sering disalurkan bersama PKH dan BPNT antara lain Bantuan Beras 10 Kg, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan BLT mitigasi pangan. Kedua program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka (<https://kemensos.go.id/>) .

Menurut Restianti (2017: 2), menjelaskan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan kepada anak sekolah seharusnya dapat menjadi pendongkrak bagi siswa untuk dapat unggul dan berprestasi, namun masih ada beberapa orang tua yang masih belum mampu mengelola dana bantuan secara bijak. Selain pengelolaan dana yang kurang bijak, implementasi bantuan Program Keluarga Harapan juga memiliki beberapa kendala dari pihak pengelola bantuan seperti sosialisasi terkait PKH yang kurang masif serta penyaluran dana kepada penerima bantuan cukup lambat. Kendala yang ditemukan dalam proses implementasi perlu diperhatikan serta diselesaikan dengan solusi yang tepat dan cepat sehingga dapat meminimalisir efek kerugian. Beberapa kendala terkait implementasi Program Keluarga Harapan dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kriteria 4T dari sebuah bantuan. Hal ini dapat menjadi masalah serius karena bantuan yang telah dijalankan menggunakan finansial yang berasal dari negara. Dana yang seharusnya menjadi investasi bagi Indonesia kedepannya untuk mengurangi kemiskinan serta melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi gagal akibat pengelolaan serta implementasi yang buruk dari sebuah kebijakan publik. Efek kerugian dalam proses implementasi tidak baik bagi pengelola serta penerima bantuan PKH, efek ini secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perkembangan bangsa Indonesia kedepannya.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan dalam beberapa paragraf sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Dari uraian yang telah dikemukakan di latar belakang, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. meninjau implementasi bantuan PKH bagi anak sekolah di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan menyesuaikan terhadap regulasi yang telah diterapkan pemerintah Indonesia.
2. Masalah penelitian ini sesuai dengan teori *Van Meter dan Van Horn* mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik salah satunya terkait agen pelaksana dari unit terbesar sampai terkecil dalam suatu organisasi pemerintah.
3. Peninjauan terkait implementasi bantuan PKH kepada anak sekolah juga mesti dilihat dari sisi masyarakat apakah sudah tepat guna dan berdampak terhadap anak yang mendapatkan bantuan.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan, maka fokus penelitian ini adalah mengenai efektivitas dan efisiensi dari implementasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat belum maksimal.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian yaitu: Bagaimana efektivitas dan efisiensi dari implementasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi

kemiskinan di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat?

1.5 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan maka tujuan dari peneliti yaitu mengetahui efektivitas dan efesiensi dari implementasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yakni diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan di jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjungpura pada kajian kebijakan publik mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yakni diharapkan sebagai bahan masukan dan wawasan bagi mahasiswa, masyarakat yang terkait tentang proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori

2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan dipahami sebagai suatu arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan dengan konsekuensi daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), sedangkan kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan hakikatnya memiliki sifat publik, punya makna yang lebih luas untuk diartikan masing-masing individu. Kebijakan publik identik dengan pemerintahan dan organisasi untuk mengatasi masalah-masalah publik. Menurut Carl Friedrich (Wahab 2012: 9), kebijakan publik adalah suatu rangkaian tindakan yang saling berhubungan menuju pada tujuan yang dibuat oleh lembaga, individu atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang dari tugas pemerintah yang memiliki masalah tertentu sehingga dapat mewujudkan sasaran yang diinginkan. Pemerintah memiliki tugas dalam menyelesaikan masalah publik yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, pertahanan keamanan, energi, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam

konteks masyarakat melibatkan berbagai aktor, nilai, ideologi, kepentingan dan lingkungan.

Kebijakan publik menjadi sebuah alat bernegara untuk mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan publik dapat dijadikan indikator sejauh mana sebuah kebijakan sebagai komponen negara. Menurut Nugroho (2009: 11), negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja. Pemangku kekuasaan pasti berkepentingan mengendalikan sekaligus mengelola negara, hal ini dijadikan sebuah strategi untuk merealisasikan arah dan tujuan negara yang lebih bernilai baik. Serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan kebijakan publik mempunyai orientasi pada tujuan memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Tindakan yang berkaitan dengan kebijakan publik dipandu oleh konsepsi dan diimplementasikan oleh program sebagai rangkaian tindakan yang dibuat dalam menanggapi masalah sosial.

Kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Frank Fischer (Suharno 2013: 78), kebijakan publik dapat berisikan tentang nilai kebijakan publik untuk generasi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, karena ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai hidup masyarakat maka kebijakan publik tersebut akan mendapatkan resistensi ketika akan diimplementasikan. Penyusunan sebuah kebijakan publik menjadi hal yang perlu diperhatikan karena dari kebijakan publik dapat lahir nilai-nilai kebaikan atau bahkan keburukan di masyarakat.

Melibatkan metode ilmiah serta melalui serangkaian tahapan sistematis yang berbasis bukti, analisis dan pertimbangan cermat, kebijakan publik disusun dari tahapan ide menuju penerapannya dimasyarakat. Berikut ini adalah tahapan dalam metode ilmiah untuk menyusun kebijakan publik yaitu:

1. Identifikasi masalah: Tahapan ini digunakan untuk merumuskan masalah apa saja yang perlu diatasi dan juga menuntukan prioritas masalah. Selain itu, identifikasi masalah juga harus didukung dengan pengumpulan informasi tentang masalah tersebut dengan berbagai metode sehingga pemerintah dapat paham tentang akar permasalahan sebelum memutuskan sebuah kebijakan.
2. Formulasi kebijakan: Setelah menemukan akar permasalahan dengan didukung data yang relevan, dilakukan lah analisis kritis secara kuantitatif dan kualitatif untuk menggali solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Solusi juga harus menimbang beberapa aspek terkait efektivitas, dampak, manfaat, dan tingkat kesulitan dalam implementasi kebijakan yang akan diambil.
3. Adopsi kebijakan: Setelah mendapatkan berbagai alternatif solusi, solusi terbaik dipilih untuk dijadikan sebuah kebijakan. Proses pemilihan solusi ini juga melibatkan penilaian secara potensial dengan melihat dampak positif dan negatif kedepannya. Kebijakan publik yang akan diimplementasikan dapat berupa kebijakan, program atau tindakan tertentu untuk mengatasi masalah.
4. Implementasi kebijakan: Solusi yang sudah dipilih kemudian memasuki tahapan untuk diterapkan kepada publik. Implementasi dari sebuah kebijakan publik melibatkan berbagai langkah dalam prosesnya seperti alokasi sumber daya, pembuatan regulasi, perubahan prosedur, penyedia layanan, dll. Kebijakan publik yang sudah diimplementasikan haruslah diawasi dalam

pelaksanaannya. Pengawasan dalam kebijakan publik yang sedang berjalan merupakan salah satu cara menjaga dampak positif dari sebuah kebijakan itu sendiri. Pengawasan kebijakan publik yang baik memiliki indikator penilaian secara positif maupun negative.

5. Penilaian Kebijakan: Proses Panjang dalam penyusunan kebijakan publik ditutup oleh penilaian terhadap kebijakan itu sendiri. Kebijakan dinilai berdasarkan hasil proses pengawasan yang dikemas dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dari sebuah kebijakan hendaknya berisikan efektivitas dan dampak secara positive serta negatif. Melalui penilaian terhadap kebijakan publik yang telah diimplementasikan, langkah kedepannya kebijakan mungkin perlu direvisi atau diperbarui. Langkah ini menjadikan sebuah kebijakan publik menjadi adaptif sehingga bisa menyesuaikan terhadap perubahan waktu dan kondisi negara serta dunia

Menurut Hugwood dan Gunn (Dewi 2022: 17) berpendapat bahwa sebuah tindakan dari pemerintah dapat diartikan sebagai kebijakan publik, sikap diam dalam menanggapi permasalahan dimasyarakat juga merupakan salah satu tindakan dari kebijakan publik itu sendiri, kebijakan publik dengan menunjukkan sikap diam merupakan cara pandang pemerintah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Pilihan untuk diam bisa diartikan bahwa pemerintah memilih untuk tidak mengintervensi atau mungkin sedang mengevaluasi pilihan sebelum mengambil tindakan lainnya. Respon diam sebagai kebijakan publik mengindikasikan pilihan ini dapat jadi hal efektif dalam menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan aspek-aspek masalah baru yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan. Analisis tentang sikap diam sebagai kebijakan publik melibatkan penilai dengan beberapa konteks seperti

politik, sosial, ekonomi, nilai-nilai masyarakat, sumber daya yang tersedia dan dampak potensial dari berbagai opsi kebijakan. Namun, keputusan memilih sikap diam dalam kebijakan publik juga memiliki konsekuensinya sendiri. Pemerintah dapat dinilai tidak menganggap suatu masalah yang terjadi dimasyarakat sebagai prioritas, bahkan pemerintah dianggap menunjukkan ketidakmampuan untuk menangani masalah tersebut. Akibat dari penilaian buruk terkait sikap pemerintah yang diam, hal ini dapat memunculkan desakan-desakan dari publik dengan efek terburuk terganggunya stabilitas negara.

Kebijakan publik sebagai komponen negara terus tumbuh beradaptasi menyesuaikan kondisi disetiap zaman. Kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik yang hidup serta berkembang dimasyarakat. Menurut Wahab (2012: 18), menjelaskan bahwa kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang khas sehingga sebuah kebijakan memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan lain. Menurut Mustari (2015: 39-42), suatu kebijakan memiliki ciri-ciri untuk dikategorikan sebagai kebijakan publik, berikut ini ciri-ciri dari kebijakan publik:

1. Kebijakan publik dibuat dengan sebuah tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan dari kebijakan publik bersifat umum sehingga pembuat kebijakan harus cermat dalam menetapkan sebuah kebijakan.
2. Kebijakan publik memiliki keterikatan dengan kebijakan yang lain. Kebijakan yang saling berkaitan dapat bersifat dinamis karena terdiri dari serangkaian pola-pola yang ada dimasyarakat, pejabat pemerintah dan penegakan hukum.
3. Kebijakan publik berasal dari apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang dikatakan akan dilakukan atau apa yang mereka ingin lakukan.

4. Kebijakan publik itu berwujud dalam sebuah dampak yang menjadi positif atau negatif terhadap masyarakat.
5. Kebijakan publik berlandaskan pada hukum, sehingga secara tidak langsung memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi. Kebijakan memiliki sifat otoratif dan kompleks sehingga membutuhkan pertimbangan yang matang dalam menerapkannya.

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari sebuah instrumen kebijakan publik yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur, mempengaruhi dan membentuk masyarakat menuju ke tujuan yang diinginkan. Kebijakan publik juga berfungsi sebagai alat dalam menyelesaikan masalah yang timbul dimasyarakat. Terealisasinya sebuah kebijakan publik secara baik, dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan umum di masyarakat serta sekaligus melindungi hak dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Menurut Theodore J. Lowi (Winarno 2016: 183), kebijakan publik memiliki unsur-unsur penting dalam masyarakat, hal inilah yang menyebabkan kebijakan publik perlu ada. Berikut terdapat beberapa unsur-unsur penting yang dapat dimengerti mengapa kebijakan publik perlu ada antara lain:

1. Kebijakan publik sebagai alat untuk menyebarkan kekuasaan di dalam masyarakat. Kebijakan sebagai media bagi pemerintah untuk membentuk hubungan ke masyarakat dan sektor swasta. Melalui kebijakan publik yang berorientasi dengan tujuan baik, pemerintah dapat memutuskan untuk mengalokasikan sumber daya dan hak individu kepada masyarakat. Penyelesaian masalah publik seperti ekonomi, sosial, politik dan lingkungan

dapat menjadi media bagi pemerintah untuk menyebarkan kekuasaannya dengan menetapkan sebuah kebijakan publik.

2. Kebijakan publik sebagai pendistribusian kekayaan di dalam masyarakat. Pendistribusian ini merupakan sebuah cara untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Realisasi pendistribusian kekayaan di dalam masyarakat melalui kebijakan publik terwujud seperti kebijakan pajak, subsidi dan program-program sosial dari pemerintah.
3. Kebijakan publik yang dapat membagi manfaat atau beban secara berbeda kepada kelompok masyarakat. Beberapa kelompok di masyarakat mungkin mendapat keuntungan lebih besar dari kebijakan tertentu sedangkan beberapa kelompok masyarakat mendapatkan beban lebih besar dari sebuah kebijakan publik, hal ini dapat menciptakan dinamika pembagian manfaat di masyarakat.
4. Kebijakan publik memiliki kemungkinan untuk digunakan mengubah distribusi kekuasaan, kekayaan dan keuntungan dalam masyarakat. Penerapan kebijakan publik dalam konteks ini dapat mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi.
5. Kebijakan publik yang dipengaruhi oleh politik dan persaingan antar berbagai kelompok dalam penetapan sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan publik terkadang didasarkan pada fakta politik yang ada sehingga dapat diterima oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Sebuah kebijakan hendaknya memiliki prinsip moral yang berlaku di masyarakat.

Sebuah kebijakan publik yang telah disusun sampai ke tahap implementasi dari kebijakan tersebut memiliki sebuah target kebijakan dapat terus diterapkan. Penerapan sebuah kebijakan publik pasti memiliki beberapa kendala, kendala ini

biasanya diatasi dengan beberapa kebijakan lain yang saling terkait. Menurut Kadji (2015: 14), pemberian sanksi (*punishment*) dan hadiah (*reward*) dapat dijadikan stimulus bagi masyarakat untuk menerapkan kebijakan publik secara baik. Sanksi merupakan tindakan hukuman yang diberikan kepada pihak pelanggar sebuah kebijakan, penerapan sanksi dapat berupa hukuman fisik (cambuk dan penjara), hukuman materi (ganti rugi dan penyitaan aset), atau hukuman sosial (pengucilan dimasyarakat). Sedangkan hadiah merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada pihak yang mematuhi kebijakan, penerapan hadiah dapat berupa penghargaan fisik (pemberian piala dan fasilitas), penghargaan materi (pemberian subsidi dan insentif), atau penghargaan sosial (pemberian pujian dan pengakuan). Unsur sanksi dan hadiah memiliki peranan dalam memengaruhi sejauh mana sebuah kebijakan publik dapat terus diadopsi dan diimplementasikan.

Keputusan dalam menerapkan sebuah kebijakan publik tidak terlepas dari analisa sebelum menerapkan sebuah kebijakan dilanjutkan dengan partisipasi masyarakat dalam penerapan sebuah kebijakan publik. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik seringkali dihadapkan dengan permasalahan keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan informasi terkait kebijakan yang akan dibuat. Praktik dari sebuah penerapan kebijakan publik hendaknya dilakukan secara bertahap serta berkelanjutan, bukan sebuah perubahan secara besar-besaran. Mengedepankan analisa berdasarkan aspek makro dan mikro dapat membantu pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan publik. Menurut David Easton (Kadji 2015: 19), analisa dari aspek makro yang mempengaruhi kebijakan publik, yakni lingkungan domestik dan lingkungan internasional meliputi pertimbangan terhadap kondisi serta dinamika ekonomi, sosial dan politik. Aspek makro ini

memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konteks di mana kebijakan publik dibuat dan diimplementasikan. Selanjutnya aspek yang tidak kalah penting yaitu aspek mikro yang meliputi peran individu, kelompok atau organisasi tertentu dalam penerapan kebijakan publik. Aspek mikro ini memberikan pemahaman bagaimana dampak dari individu dan kelompok menyesuaikan dengan kebijakan publik. Adanya analisa dari aspek makro dan mikro menandakan bahwa kebijakan publik tidak boleh asal diputuskan, apa pun kondisi dan situasinya, karena setiap kebijakan mempunyai dampak yang cukup besar bagi masyarakat secara luas.

Pembuatan kebijakan publik memiliki banyak metode dan faktor dalam pembuatannya. Menurut Yuningsih (2014: 3), untuk membuat sebuah kebijakan publik, perlu memperhatikan segitiga kebijakan yang memiliki tiga aktor utama yaitu Eksekutif, Legislatif dan Kelompok Kepentingan. Tiga aktor ini saling berkaitan karena memiliki kepentingan serta peran dalam pembuatan kebijakan publik. Berikut penjelasan terkait ketiga aktor utama dalam pembuatan kebijakan publik:

1. Eksekutif: Representasi dari aktor eksekutif dalam kenegaraan adalah pemerintah sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik. Eksekutif juga memiliki peran dalam mengelola sumber daya, personel dan program terkait dengan bidang tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan dari sebuah kebijakan publik. Peranan eksekutif dalam pelaksanaan kebijakan publik juga menjadi sorotan apabila pelaksanaan kebijakan publik tidak dapat berjalan secara maksimal atau bahkan gagal.
2. Legislatif: Aktor legislatif dalam kenegaraan dapat dianggap badan yang memiliki yurisdiksi atas sektor, isu, atau topik tertentu dalam pengambilan

kebijakan. Peranan legislatif untuk merumuskan, mereview, dan mengamandemen undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan yurisdiksinya. Legislatif juga memainkan peranan sebagai penginisiasi, peninjau dan pengubah kebijakan publik. Badan legislatif dapat menjadi jembatan perantara antara eksekutif dan kelompok kepentingan dalam menentukan arah kebijakan.

3. Kelompok Kepentingan: Kelompok kepentingan dapat dijabarkan sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam isu atau sektor tertentu. Kelompok ini dapat berupa organisasi nirlaba, asosiasi industri, kelompok advokasi, dll. Keterlibatan kelompok tertentu dalam pembuatan kebijakan publik dengan melobi eksekutif dan legislatif untuk memasukan suatu kepentingan golongan di dalam kebijakan publik.

Kebijakan publik yang telah diterapkan dalam masyarakat pastinya memiliki sebuah tujuan, tujuan ini juga terkadang memiliki beragam sudut pandang. Menurut Nugroho (2015: 25), tujuan dari kebijakan publik dapat beragam karena tergantung pada nilai, prioritas, dan ideologi pemerintah yang berkuasa di periode itu. Pendefinisian terkait kebijakan publik juga dapat berupa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera, dan adil sentosa. Kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai keputusan otoritas negara yang mengatur kehidupan bersama, kesimpulan ini dibuat berdasarkan hal-hal berkaitan kebijakan publik seperti kesejahteraan sosial, stabilitas politik, keamanan nasional, keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi. Tujuan kebijakan publik dapat berubah seiring waktu dengan perkembangan masyarakat, perubahan politik, perubahan ekonomi dan faktor lain di luar negara.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu dan kelompok yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan publik dapat digunakan untuk menilai sebuah kebijakan publik yang telah disusun dapat berjalan secara maksimal atau bahkan mengalami kegagalan. Tahapan implementasi kebijakan publik secara tidak langsung memainkan peran untuk mematangkan sebuah kebijakan publik karena setelah diimplementasikan kebijakan dapat dievaluasi atau dinilai keefektifitasannya. Implementasi kebijakan publik dinilai kompleks karena banyak hal terkait dalam penerapannya, maka dibutuhkan perlakuan yang dapat memecahkan masalah kompleksitas dalam implementasi kebijakan publik. Melakukan pendekatan dengan cara memahami lingkungan dari sisi sosial, politik, ekonomi dan budaya merupakan cara dalam implementasi kebijakan publik. Kemudian terdapat peran kelompok dalam implementasi kebijakan publik, kelompok masyarakat dapat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan publik. Menurut Rodiyah dkk. (2022: 112-113), peranan pemerintah sebagai aktor dalam implementasi kebijakan publik juga penting, pemerintah harus memiliki strategi seperti melakukan penyesuaian kebijakan dengan kondisi lapangan, mengelola konflik yang timbul selama implementasi kebijakan publik, membangun koalisi dengan individu dan kelompok yang dapat menudukung keberhasilan implementasi kebijakan publik dan melakukan negosiasi kebeberapa pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam implementasi kebijakan publik.

Implementasi kebijakan publik dikaitkan dengan tindakan administratif yang dapat dimulai jika tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan sudah ditetapkan, kemudian berdampingan dengan program kegiatan yang telah tersusun serta dana untuk menjalankan kebijakan tersebut mencapai sasaran. Implementasi kebijakan publik juga harus memahami mengapa dan bagaimana sebuah kebijakan publik dapat berakhir, dicabut atau ditarik kembali. Menurut Tachjan (2006: 19), efektivitas harus dimiliki dalam implementasi kebijakan publik, hal ini dapat terlihat dari sebuah kebijakan yang memiliki tujuan jelas, konsisten, realistis, konkret dan didukung oleh politik. Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab sebagai pelaksana implementasi kebijakan publik juga harus memiliki sumber daya yang memadai, struktur, budaya kerja, komunikasi dan kemitraan yang baik sehingga koordinasi dengan organisasi lain terkait implementasi kebijakan publik dapat terlaksana dengan baik. Kepemimpinan yang baik juga harus dimiliki supaya implementasi kebijakan publik dapat berjalan sebagaimana mestinya dan jika ada perubahan kebijakan pelaksanaan kebijakan yang telah berjalan tidak terganggu saat masa transisi. Pengakhiran dari sebuah kebijakan publik juga termasuk kedalam implementasi kebijakan publik, pengaturan transisi dan pengelolaan perubahan yang mungkin timbul dari pengakhiran kebijakan tersebut.

Sedangkan Purwanto (2007) berpendapat “Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu

diwujudkan”. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus merupakan studi yang sangat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan publik yang telah disepakati dan disahkan tidak akan bermanfaat jika pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut kurang maksimal. Karena pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui.

Implementasi dari setiap kebijakan publik memiliki tujuan yang jelas ketika direalisasikan kepada masyarakat. Implementasi kebijakan publik juga dapat dianggap sebagai pembangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah, melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik membutuhkan peran pemerintah dalam menganalisa kesenjangan antara tujuan dan realisasi. Sebelum menganalisa kesenjangan antara tujuan dan realisasi hendaknya sebagai pembuat

kebijakan mengenali tujuan dari kebijakan publik dibuat sehingga ketika masalah muncul mengenai kesenjangan antara tujuan dan realisasi kebijakan publik, pembuat kebijakan mampu memahami penyebab dari kendala yang ada lalu melakukan perbaikan dari implementasi kebijakan publik. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik juga terus beradaptasi dengan kondisi dari implementasi kebijakan publik yang bersifat adaptif. Sebuah implementasi kebijakan publik yang memiliki karakteristik tujuan yang tidak jelas, tidak konsisten, tidak didukung oleh politik dan tidak realistis dapat mempengaruhi dari implementasi kebijakan itu sendiri (Hermana dkk., 2019: 10).

Dalam pandangan umum masyarakat mengetahui bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dimana rancangan kebijakan mulai dilaksanakan dan memastikan tujuan kebijakan tersebut tercapai. Implementasi adalah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi pada dasarnya adalah untuk membangun hubungan sebab-akibat agar kebijakan tersebut mempunyai dampak. Kebijakan dibuat saat ia sedang diatur dan diatur saat sedang dibuat, karena suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno 2005: 34). Implementasi sendiri memiliki tujuan secara umum, tugas implementasi adalah untuk membangun link yang memungkinkan tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

Kebijakan publik yang telah dibuat melalui proses yang cukup panjang kedepannya harus diimplentasikan, hal ini diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif untuk melihat hasil dapat sesuai atau tidak dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Keberhasilan sebuah kebijakan ditentukan oleh

dua faktor yaitu *content* atau isi kebijakan dan konteks implementasi. Implementasi kebijakan publik diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Kebijakan publik yang telah diimplementasikan memiliki berbagai alasan untuk mencapai sebuah tujuan. Memastikan efektivitas dan efesiensi dari sebuah kebijakan publik didapat ketika kebijakan publik diimplementasikan, hal ini berkaitan dengan masyarakat sebagai objek yang berdampak dari implementasi kebijakan publik dapat merasa kebutuhan dan tuntutananya dibantu sehingga pemerintah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Implementasi juga dapat dianggap sebagai bentuk melihat kebijakan publik diuji oleh realitas, keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan tidak hanya bergantung pada konsep serta perencanaan tetapi seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan sehingga memungkinkan timbulnya perubahan tidak terduga dari sebuah implementasi kebijakan publik. Hasil dari kegiatan pemerintah tersebut yang kemudian kita sebut dengan sebuah program yang akan dilaksanakan oleh birokrat yang berada di lapangan (*street level bureaucracy*) yang kemudian diarahkan kepada kelompok sasaran. Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi sumber pembelajaran untuk kebijakan di masa depan dan membantu dalam penyempurnaan dari sebuah kebijakan publik (Khaidir, 2017: 28-30).

Aspek penting dalam proses kebijakan publik adalah implementasi kebijakan publik karena dampak atau tujuan dari kebijakan dapat dirasakan ketika sudah diimplementasikan. Implementasi merupakan tahap dimana kebijakan publik yang

hanya berupa dokumen atau rencana diubah menjadi tindakan-tindakan nyata yang mencakup usaha untuk mengubah kondisi dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, Implementasi juga dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang di mana berbagai aktor organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Peran penting pemerintah sebagai penanggung jawab dalam implementasi kebijakan publik harus memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kebijakan publik dengan baik karena menghadapi realita lapangan seringkali dihadapkan dengan kompleksitas dan dinamika masalah yang harus diatasi dengan cepat serta tepat. Implementasi juga menjadi sarana untuk mengukur seberapa jauh kebijakan dapat direalisasikan, hasil dari implementasi dapat menjadi gambaran keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi bukan langkah akhir dalam siklus kebijakan, tetapi juga sebuah tahap yang memiliki dampak langsung pada keberhasilan atau kegagalan dalam kebijakan sehingga memungkinkan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Kesuksesan implementasi memastikan bahwa konsep kebijakan diwujudkan dalam perubahan nyata di lapangan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Ravyansah dkk., 2022: 97).

Menurut Mursalin (2017: 3) berpendapat bahwasanya implementasi kebijakan publik dinilai harus memiliki keefektifan, hal ini bergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Peran pemerintah yang harus dapat menyesuaikan kondisi lapangan sehingga sebuah kebijakan menjadi efektif saat memasuki tahapan

implementasi. Penyesuaian dengan kondisi lapangan dapat berupa pengambilan sebuah keputusan yang menyesuaikan kebutuhan di masing-masing daerah sehingga kebijakan menjadi efektif. Kebutuhan untuk beradaptasi harus beriringan dengan kemampuan berinteraksi secara baik ke masyarakat, dengan adanya interaksi yang baik masalah yang timbul saat implementasi kebijakan dapat diminimalisir seminim mungkin sehingga kebijakan dapat terus berjalan. Efektivitas dari implementasi kebijakan publik menjadi seluruh tanggung jawab pemerintah sebagai pihak penyelenggara, tahapan implementasi sudah melibatkan banyak individu dan kelompok termasuk individu dan kelompok pemerintah di unit terkecil. Unit terkecil juga harus dibekali pemahaman bagaimana kebijakan publik semestinya dijalankan. Ruang lingkup kerja yang kondusif, penghargaan dan hukuman dalam melaksanakan implementasi kebijakan publik juga mesti menjadi perhatian karena faktor-faktor ini dapat mempengaruhi efektivitas dalam menjalankan kebijakan. Selain itu birokrat tingkat bawah harus memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kebijakan publik dengan baik.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Meutia 2013: 82) memberikan pendapat bahwa “pengertian implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Dari beberapa uraian mengenai pengertian implementasi kebijakan publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi suatu kebijakan menyangkut tiga hal penting, yaitu adanya sasaran atau tujuan dari suatu kebijakan, adanya aktivitas/kegiatan yang dilakukan untuk

pencapaian tujuan, adanya hasil dari kegiatan tersebut. Tahap implementasi menentukan apakah kebijakan yang ditempuh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan.

Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan. Menurut Fahturrahman (2016: 2), berpendapat bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian hasil akhir (*output*), yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai atau belum. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Terkait dengan hal tersebut, maka keberhasilan sebuah proses implementasi kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang di dalamnya terkandung muatan politik.

2.1.3 Proses Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik memiliki kompleksitas dalam penerapannya, hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan publik memiliki ketidakpastian untuk berhasil mencapai tujuannya sehingga dalam proses implementasi diperlukan faktor-faktor pendukung untuk mencapai keberhasilan.

Pemerintah sebagai organisasi yang menjadi kunci pelaksana dari implementasi kebijakan publik sekaligus perumus dari kebijakan publik memiliki peran penting untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan publik. Menurut Marwiyah (2023: 65-66) berpendapat bahwa kebijakan publik yang akan diterapkan haruslah punya karakteristik yang jelas untuk mendukung keberhasilannya saat di implementasikan kepada masyarakat, karakteristik dari sebuah kebijakan meliputi kebijakan publik itu sendiri, tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia dan tingkat kepastian kebijakan. Setelah memiliki karakteristik yang jelas dari sebuah kebijakan publik maka proses implementasi kebijakan publik bisa berjalan baik walaupun pastinya terdapat kendala di lapangan. Pemerintah sebagai pelaksana dari kebijakan publik memiliki peran penting sehingga pemerintah dari semua struktur organisasi dituntut untuk memiliki pemahaman tentang kebijakan publik, sumber daya saat proses implementasi, lingkungan yang kondusif bagi implementasi kebijakan publik dan budaya kerja yang baik saat proses implementasi kebijakan publik. Kondisi internal yang baik saat proses implementasi kebijakan publik juga harus didukung dengan instrumen kebijakan seperti regulasi, insentif fiskal, kebijakan ekonomi, dll. Pemilihan instrumen kebijakan dipengaruhi oleh konteks kebijakan, tekanan politik, tuntutan masyarakat dan ketersediaan sumber daya.

Kebijakan publik sejatinya hadir untuk menyelesaikan sebuah masalah diranah publik atau masyarakat, proses implementasi merupakan puncak dari kebijakan publik itu dapat dinilai menyelesaikan sebuah masalah atau tidak. Banyak faktor yang dapat membuat proses implementasi menjadi berhasil atau gagal salah satunya ambiguitas dari kebijakan itu sendiri. Ambiguitas kebijakan merupakan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang muncul di kebijakan publik itu sendiri,

ambiguitas kebijakan biasanya dikaitkan dengan ketidakjelasan tujuan kebijakan, tata cara pelaksanaan yang tidak pasti, atau interpretasi yang berbeda terhadap kebijakan sehingga menyulitkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan publik. Selanjutnya salah satu faktor yang rentan untuk terjadi dan menjadi bagian dari proses implementasi kebijakan publik adalah konflik kebijakan. Konflik dapat diartikan sebagai tingkat perbedaan kepentingan atau tujuan yang terkandung dalam kebijakan publik antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, termasuk konflik antara tingkat pemerintahan yang berbeda, atau antara kelompok kepentingan yang berbeda. Kebijakan publik dengan kompleksitas konflik yang tinggi mengakibatkan beberapa pihak kesulitan untuk bekerja sama dan mencapai tujuan kebijakan. Menghadapi permasalahan yang seringkali terjadi saat proses implementasi dibutuhkan kemampuan dari pemerintah mengembangkan strategi adaptasi dan interpretasi sendiri untuk mengatasi masalah. Permasalahan yang terjadi pada penerapan kebijakan publik memberikan gambaran bahwa proses implementasi bukanlah proses yang linier, tetapi lebih merupakan respons terhadap kondisi ambiguitas dan konflik yang dapat berkembang selama pelaksanaan kebijakan. (Richard Matland - Dewi, 2022: 172-177).

Proses implementasi kebijakan publik memiliki faktor-faktor untuk berhasil mencapai tujuannya, hal ini dapat terlihat ketika faktor-faktor ini hilang proses implementasi tidak berjalan cukup efektif. Faktor-faktor yang terikat dengan implementasi kebijakan publik disusun dalam sebuah model yang memberikan gambaran mengenai suatu objek, situasi atau proses. Salah satu model yang memiliki pemahaman bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari

kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut ini penjelasan terkait faktor-faktor dari proses implementasi kebijakan publik yang tersusun dalam sebuah model (Van Meter dan Van Horn – Tachjan, 2006: 39-40):

1. Standar dan sasaran kebijakan merupakan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Standar dan sasaran ini harus jelas serta terstruktur sehingga dapat direalisasikan. Sebuah kebijakan publik yang memiliki cakupan luas pastinya terdapat kompleksitas dalam implementasi apalagi dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Standar dan sasaran kebijakan menjadi hal penting karena dari sinilah karakteristik kebijakan publik dapat terlihat, karakteristik kebijakan dengan tujuan jelas, fleksibilitas, konsisten, realistis dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat memungkinkan sebuah kebijakan untuk berhasil diimplementasikan dengan sedikit hambatan.
2. Sumber daya merupakan faktor yang menopang proses implementasi kebijakan publik untuk dilaksanakan. Sumber daya dalam proses implementasi kebijakan publik dapat berupa sumber daya manusia, finansial, fisik atau peralatan dan kewenangan. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia secara memadai. Pentingnya faktor sumber daya dari proses implementasi kebijakan publik haruslah dibekali dengan pemahaman mengelola sumber daya secara baik, jangan sampai sumber daya yang sudah disediakan tidak dapat dimanfaatkan secara efisien bahkan sampai dikorupsi. Sumber daya dalam proses implementasi seharusnya memiliki kualitas seperti

yang sudah dikonsepskan, ketersediaan sumber daya juga perlu diperhatikan karena ini dapat berpengaruh saat sumber daya akan dialokasikan untuk melaksanakan kebijakan publik.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas merupakan faktor yang sangat berkaitan dengan keberhasilan dari proses implementasi kebijakan publik. Komunikasi dapat dikaitkan dengan proses penyampaian informasi dan pemahaman tentang kebijakan publik kepada para pelaksana dari semua unit yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Komunikasi antar organisasi terkait diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan secara konsisten oleh semua organisasi yang terlibat. Komunikasi yang dibangun haruslah efektif sehingga pelaksana dapat memahami tujuan kebijakan, sasaran kebijakan, dan prosedur pelaksanaan kebijakan. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit sehingga dibutuhkan pemahaman berkomunikasi yang baik dengan memahami tiga dimensi komunikasi yaitu transmisi, konsistensi dan klarifikasi. Efek dari komunikasi efektif berimbas pada aktivitas terkait implementasi kebijakan publik, kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
4. Karakteristik agen pelaksana merupakan faktor dengan cangkupan organisasi yang menjalankan proses implementasi kebijakan publik karena hal ini berkaitan dengan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi dalam organisasi, serta bagaimana alur komunikasi dan koordinasi antar unit atau individu dalam organisasi. Semua kegiatan yang berjalan di dalam organisasi dipengaruhi dengan budaya, kapasitas, struktur serta komitmen dari organisasi

tersebut untuk menjalankan bahkan menciptakan program terkait kebijakan publik. Organisasi pelaksana yang berukuran besar dan memiliki struktur organisasi yang kompleks akan lebih sulit untuk mengimplementasikan kebijakan publik daripada organisasi pelaksana yang berukuran kecil dan memiliki struktur organisasi yang sederhana. Hal ini disebabkan karena organisasi pelaksana yang berukuran besar dan memiliki struktur organisasi yang kompleks membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Oleh karena itu kondisi struktur organisasi birokrasi harus kondusif terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang ditetapkan secara politis dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Struktur birokrasi yang efisien dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik.

5. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari sebuah wilayah juga dapat mempengaruhi hasil dari proses implementasi kebijakan publik. Kondisi lingkungan yang tidak kondusif di internal maupun eksternal dapat menghambat pelaksanaan dari kebijakan publik. Lingkungan ekonomi juga dapat terlihat dari atensi masyarakat terhadap sebuah kebijakan yang diimplementasikan. Kondisi ekonomi bawah, menengah dan atas memiliki perbedaan cara merespon atau menjalankan sebuah kebijakan publik yang sedang diimplementasikan. Perbedaan cara merespon dan bersikap dari sebuah kebijakan publik yang diimplementasikan terbentuk karena adanya lingkungan sosial dari masyarakat tinggal di sebuah wilayah. Dari lingkungan sosial ini juga dapat dipengaruhi oleh pandangan politik yang beragam di setiap wilayah. Upaya untuk mengimplementasikan kebijakan publik dengan menyesuaikan lingkungan dari setiap wilayah memerlukan dukungan dari kelompok-

kelompok diwilayah tersebut untuk mendukung implementasi dari sebuah kebijakan publik.

6. Sikap para pelaksana kebijakan publik juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan publik. Pelaksana menjadi kunci dalam menjalankan proses implementasi kebijakan publik sehingga pelaksana harus memiliki sikap terkait dengan komitmen, kapabilitas, dan kepatuhan mereka terhadap kebijakan tersebut. Sikap dan komitmen dari individu yang terlibat dalam implementasi kebijakan dapat mempengaruhi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil diimplementasikan. Pelaksana yang memiliki sikap positif dan komitmen tinggi terhadap kebijakan akan lebih mungkin untuk melaksanakannya dengan baik. Disposisi yang positif dapat meningkatkan motivasi dan komitmen para aktor untuk melaksanakan kebijakan publik. Pelaksana dituntut memiliki sikap belajar terus menerus sehingga kapabilitas mereka dapat terus meningkat seiring dalam menjalankan kebijakan publik.

Menerapkan konsep dari sebuah kebijakan publik menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan tertentu dapat dijabarkan sebagai proses implementasi kebijakan publik. Proses implementasi kebijakan publik memiliki situasi yang kompleks dan dinamis karena melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik haruslah memiliki kecakapan dalam membuat kebijakan, kecakapan ini dapat terlihat dari kualitas kebijakan publik yang efektif, jelas, spesifik dan realistis. Kebijakan publik yang sudah tergolong baik harus didukung oleh kapasitas pemerintah dari segala struktur dalam menjalankan proses implementasi kebijakan publik, kapasitas ini juga meliputi sumber daya, pengetahuan dan keterampilan.

Selain memiliki kapasitas, pemerintah juga haruslah memiliki komitmen yang tinggi dalam proses implementasi kebijakan publik, hal ini akan meningkatkan motivasi dan produktivitas dalam melaksanakan kebijakan publik. Dalam proses implementasi kebijakan publik keterlibatan pihak swasta untuk mendukung sebuah kebijakan publik dapat membuat peluang keberhasilan dari kebijakan publik meningkat. Keterlibatan beberapa pihak selain pemerintah dalam proses implementasi kebijakan publik haruslah menyesuaikan dari konteks sosial, ekonomi, dan politik di daerah tersebut. Penyesuaian dinilai penting karena dapat mengurangi hambatan dan tantangan dalam proses implementasi kebijakan publik yang pada akhirnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Publik atau masyarakat yang merasakan dampak dari proses implementasi kebijakan publik juga mengharapkan pemerintah dapat secara transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakan publik. Kepercayaan publik seharusnya dapat dijadikan faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan publik, karena dari kepercayaan ini masyarakat dapat mentoleransi beberapa kesalahan kecil yang dilakukan pemerintah saat proses implementasi kebijakan publik. Proses implementasi kebijakan publik dapat dipelajari dari berbagai kasus, dengan mempelajari kasus-kasus implementasi kebijakan publik, kita dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik (Abdoellah dan Rusfiana, 2016: 57-61).

Proses implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah

diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Menurut Taufiqurakhman (2014: 19), implementasi tersebut meliputi beberapa tahapan proses yang mempengaruhi kinerja, proses tahapan tersebut yakni penentuan pelaksana kebijakan, penentuan prosedur, menentukan besaran anggaran biaya dan sumber pembiayaan, dan penetapan manajemen pelaksana kebijakan dalam menentukan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting untuk dilakukan seperti penyiapan sumber daya, unit dan metode. Persiapan selanjutnya bagaimana menerjemahkan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan, hal ini cukup kompleks karena kebijakan publik berkaitan dengan masyarakat atau publik. Persiapan terakhir dari proses implementasi kebijakan publik terkait penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin. Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi.

Seluruh kebijakan publik yang sudah diterapkan memiliki tujuan untuk berhasil, namun tidak semua pihak mampu untuk mengoptimalkan proses implementasi kebijakan publik menuju keberhasilan. Optimalisasi ini dimulai dari pemerintahan sebagai pihak penyelenggara dan pelaksana dari kebijakan publik, pentingnya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, dari birokrasi tradisional yang kaku dan tidak efisien menjadi pemerintahan yang lebih fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Faktor yang mengakibatkan

ketidakberhasilan dalam proses implementasi kebijakan publik perlu untuk dipelajari sehingga di kebijakan publik selanjutnya tidak mengalami peristiwa yang sama. Ketidakberhasilan yang mendasari dari proses implementasi kebijakan publik adalah kebijakan itu sendiri, kebijakan publik yang tidak memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang jelas, dan prosedur pelaksanaan yang jelas merupakan representasi dari kualitas kebijakan publik tersebut. Ketidakjelasan dari kebijakan publik dapat menyulitkan pemerintah dari segala unit yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik untuk memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut. Kegagalan selanjutnya dari proses implementasi kebijakan publik yaitu pemerintah sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan publik tidak memiliki kapasitas, komitmen, atau kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Kompetensi yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam proses implementasi kebijakan publik dapat menjadi sorotan dari semua pihak termasuk pihak swasta atau organisasi swasta yang membantu untuk mencapai keberhasilan sebuah kebijakan publik. Krisis kepercayaan menjadi hal terburuk ketika pemerintah tidak mampu menunjukkan kompetensinya disaat proses implementasi kebijakan publik, hal ini tentunya dapat berpengaruh kepada lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang ada di sekitar kebijakan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan publik yang dibuat jelas, organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik efektif, aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik kompeten, dan lingkungan yang ada di sekitar kebijakan publik mendukung proses implementasi kebijakan publik (Mustari, 2015: 136-140).

Semua kebijakan publik yang memasuki tahapan proses implementasi tentunya memiliki komponen pendukung dalam prosesnya yaitu sumber daya. Sumber daya terdiri dari sumber daya finansial, manusia dan fisik yang saling berhubungan saat proses implementasi kebijakan publik. Semua sumber daya begitu penting dan saling menopang untuk mencapai keberhasilan dalam menerapkan kebijakan publik, namun kebanyakan pemerintahan atau organisasi hanya mengutamakan sumber daya finansial padahal sumber daya yang mendasari semua rangkaian dari kebijakan publik termasuk proses implementasi kebijakan publik yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam proses implementasi kebijakan publik karena dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen, proses implementasi dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga produktivitas dapat meningkat. Selain dituntut mengedepankan kualitas sumber daya manusia dalam proses implementasi, kuantitas sumber daya manusia juga dapat berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan publik. Kemudian sumber daya finansial salah satu aspek sumber daya yang penting, sumber daya ini digunakan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan kegiatan-kegiatan dalam proses implementasi kebijakan publik. Aspek sumber daya finansial dapat berupa anggaran, dana, dan sumber daya lain yang bernilai finansial. Pada proses implementasi kebijakan publik, sumber daya ini seringkali disalahgunakan dari pemerinth sebagai pembuat kebijakan, organisasi swasta yang bermitra dengan pemerintah dalam proses kebijakan publik, dan masyarakat yang mendapat manfaaat dari kebijakan publik. Sumber daya terakhir yaitu sumber daya fisik, sumber daya ini dinilai penting karena mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan implementasi kebijakan publik. Aspek sumber daya

fisik dapat berupa sarana dan prasarana, peralatan, bahan baku, teknologi dan infrastruktur. Ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan syarat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan publik. Namun, ketersediaan sumber daya saja tidak cukup. Alokasi sumber daya juga perlu dilakukan secara tepat agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Alokasi sumber daya dapat mempengaruhi keadilan dan pemerataan dari proses implementasi kebijakan publik. (Ravyansah dkk., 2022: 136).

Sebuah kebijakan publik yang akan memasuki proses implementasi memiliki persiapan salah satunya persiapan dari segi sumber daya. Sumber pembiayaan bisa diperoleh dari sektor pemerintah (APBN/APBD) maupun sektor lain (swasta atau masyarakat). Selain itu juga diperlukan penentuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan, sebab peralatan tersebut akan berperan penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Langkah selanjutnya penetapan manajemen pelaksana kebijakan diwujudkan dalam penentuan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan, dalam hal ini penentuan *focal point* pelaksana kebijakan. Setelah itu, jadwal pelaksanaan implementasi kebijakan segera disusun untuk memperjelas hitungan waktu dan sebagai salah satu alat penentu efisiensi implementasi sebuah kebijakan. Menurut Desrinelti (2021: 4), kebijakan publik yang memasuki tahapan proses implementasi mempunyai beberapa langkah yang dapat dijelaskan berikut ini merupakan tahapan-tahapan operasional implementasi sebuah kebijakan:

1. Tahapan intepretasi.

Tahapan ini merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang lebih bersifat

manajerial dan operasional. Kebijakan abstrak biasanya tertuang dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif, bisa berbentuk perda ataupun undang-undang. Kebijakan manajerial biasanya tertuang dalam bentuk keputusan eksekutif yang bisa berupa peraturan presiden maupun keputusan kepala daerah, sedangkan kebijakan operasional berupa keputusan pejabat pemerintahan bisa berupa keputusan/peraturan menteri ataupun keputusan kepala dinas terkait. Kegiatan dalam tahap ini tidak hanya berupa proses penjabaran dari kebijakan abstrak ke petunjuk pelaksanaan/teknis namun juga berupa proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan tersebut baik yang berbentuk abstrak maupun operasional kepada para pemangku kepentingan.

2. Tahapan pengorganisasian.

Kegiatan pertama tahap ini adalah penentuan pelaksana kebijakan (*policy implementor*) yang setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut: instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah); sektor swasta; LSM maupun komponen masyarakat. Setelah pelaksana kebijakan ditetapkan; maka dilakukan penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk dan referensi bagi pelaksana dan sebagai pencegah terjadinya kesalahpahaman saat para pelaksana tersebut menghadapi masalah. Prosedur tetap tersebut terdiri atas prosedur operasi standar (SOP) atau standar pelayanan minimal (SPM).

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu (relevan) yang menjadi acuan ialah:

1. Skripsi milik Hajar Hari Antoro pada tahun 2015 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 2 pengukuran efektivitas dalam pelaksanaan PKH di bidang Pendidikan di desa Sungai Kakap yaitu produktivitas dan keseluruhan prestasi, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di bidang Pendidikan di desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya masih kurang efektif, hal tersebut diketahui berdasarkan aspek produktivitas bahwa pelaksanaan PKH di bidang pendidikan di desa Sungai Kakap tidak produktif, karena belum mampu meningkatkan taraf pendidikan bagi penerima bantuan PKH serta belum bisa meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan dari aspek keseluruhan prestasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Bidang Pendidikan di desa Sungai Kakap tidak berprestasi, karena masih belum sepenuhnya tepat sasaran sesuai dengan kriteria PKH dan belum mampu mencapai tujuan PKH bidang pendidikan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanna Florida Purba pada tahun 2014 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor”. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis dapat disimpulkan Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor adalah efektif. Hal ini dapat dilihat dari

jawaban hampir seluruh responden terhadap alat ukur penelitian yaitu ketepatan sasaran program, kepuasan terhadap program, keberhasilan pelaksanaan program, tujuan dan manfaat, menghasilkan jawaban efektif.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Yang Relevan

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1	Hajar Hari Antoro (2015)	Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di bidang Pendidikan di desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya masih kurang efektif, hal tersebut diketahui berdasarkan aspek produktivitas bahwa pelaksanaan PKH di bidang pendidikan di desa Sungai Kakap tidak produktif, karena belum mampu meningkatkan taraf pendidikan bagi penerima bantuan
2	Yohana Floridina Purba (2014)	Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor	Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor adalah efektif. Hal ini dapat dilihat dari jawaban hampir seluruh responden terhadap alat ukur penelitian yaitu ketepatan sasaran program, kepuasan terhadap program, keberhasilan pelaksanaan program, tujuan dan manfaat, menghasilkan jawaban efektif.

Dari kedua penelitian tersebut, peneliti dapat mempelajari dan memahami lebih jelas mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di wilayah berbeda. Sehingga dapat diketahui perbedaan apa saja yang muncul di setiap wilayah. Persamaan kedua penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai efektivitas program. Perbedaannya terletak pada fokus, jika kedua peneliti tersebut mengambil fokus masalah ke bidang pendidikan dan juga pelaksanaan program PKH secara keseluruhan. Maka, peneliti sendiri akan memfokuskan penelitian ini dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

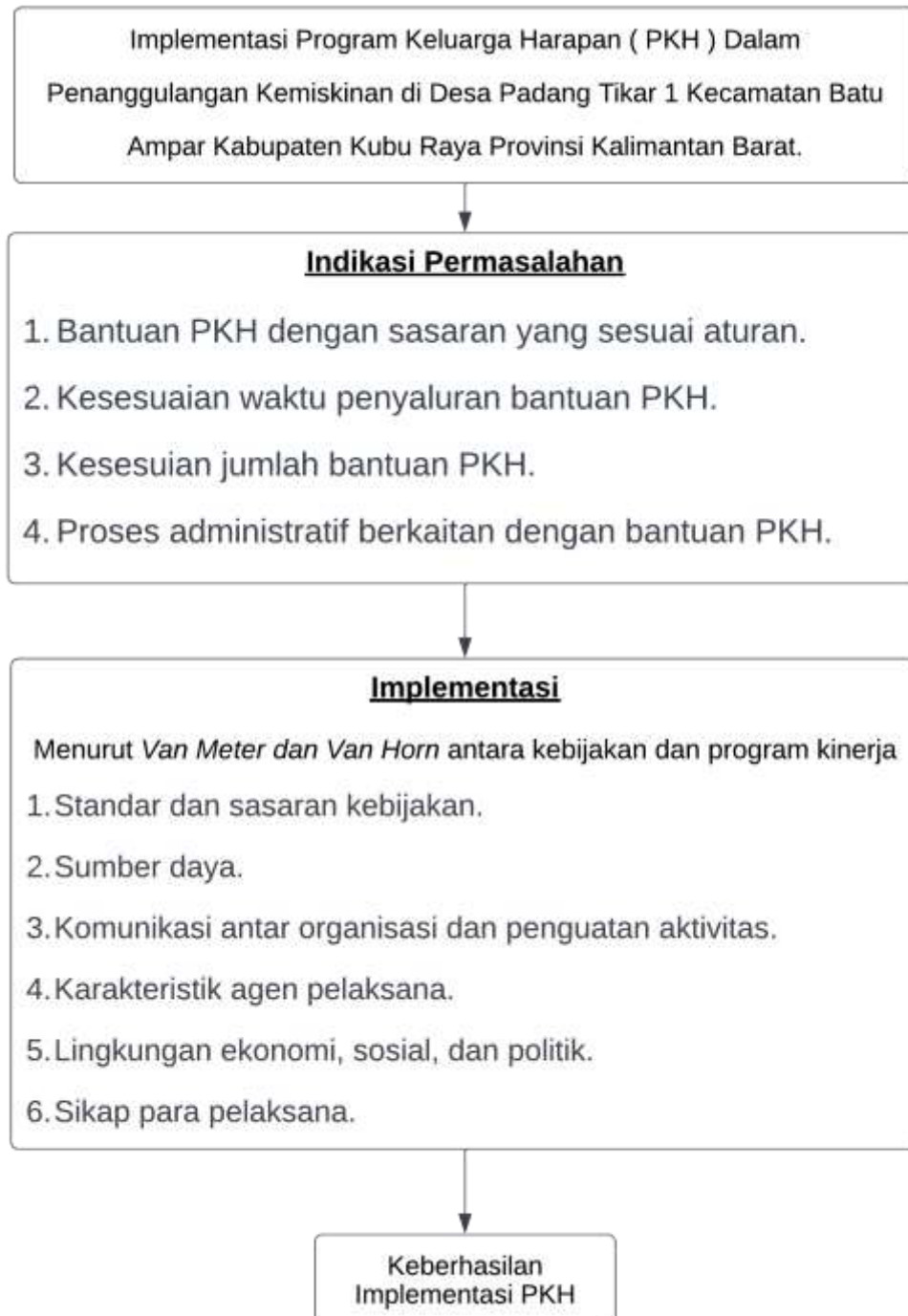
2.3 Kerangka Pikir

Kemiskinan adalah fenomena sosial struktural yang berdampak krusial terhadap keberhasilan pembangunan (indeks pembangunan manusia) dan memiliki dampak yang sangat nyata dimasyarakat, seperti rumah tangga sangat miskin baik dari kemampuan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pendidikan sampai pada pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi, yang mengakibatkan rendahnya sumber daya manusia. Penelitian ini melihat efek dari sebuah bantuan dari pemerintah yang bernama Program Keluarga Harapan dalam menuntaskan kemiskinan di Indonesia. Berkaitan dengan sumber daya manusia, pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penelitian ini berfokus melihat dampak yang dihasilkan setelah implementasi bantuan PKH ke masyarakat.

Penelitian dimulai dengan studi literatur dengan membaca dan memahami hasil penelitian terdahulu dan beberapa buku yang mendukung penelitian serta dokumen lainnya. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data dengan wawancara (*interview*) observasi serta dokumentasi yang dilakukan pada masyarakat penerima bantuan PKH di Desa Padang Tikar 1. kemudian dilanjutkan dengan analisis data

yang diperoleh dan membandingkan dengan tinjauan pustaka yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Berikut ini gambaran dari kerangka pikir penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah standar dan sasaran kebijakan mengenai bantuan PKH sudah diterapkan dengan baik sehingga implementasi kebijakan dapat menanggulangi kemiskinan?
2. Apakah sumber daya yang tersedia untuk bantuan PKH sudah cukup sehingga implementasi kebijakan dapat menanggulangi kemiskinan?
3. Apakah komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas sudah berjalan baik sehingga implementasi kebijakan dapat menanggulangi kemiskinan?
4. Apakah karakteristik agen pelaksana sudah sesuai dengan aturan sehingga implementasi kebijakan dapat menanggulangi kemiskinan?
5. Apakah kondisi lingkungan meliputi ekonomi, sosial dan politik sudah dapat mendukung sehingga implementasi kebijakan dapat menanggulangi kemiskinan?
6. Apakah sikap para pelaksana sudah layak dalam menjalankan kebijakan bantuan PKH sehingga implementasi kebijakan dapat menanggulangi kemiskinan?

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penulis berusaha untuk menggambarkan dalam bentuk kata-kata yang tertulis mengenai bagaimana proses Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dari judul penelitian yang saya buat yaitu “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Maka penelitian akan dilaksanakan di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Pemilihan tempat/lokasi penelitian ini berdasarkan pada beberapa permasalahan seperti kurang tepatnya sasaran PKH. Sedangkan waktu penelitiannya dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2022.

Tabel 3.1 Rencana jadwal pelaksanaan penelitian

No	Kegiatan Penelitian	2022				2023					
		Bulan				Bulan					
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Pengajuan Outline										
2	Acc Outline										
3	Bimbingan/ Konsultasi										
4	Seminar Proposal										

5	Melakukan Penelitian dan Bimbingan										
6	Ujian Skripsi										

Sumber: Penulis, 2023

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah informan atau narasumber. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian ini adalah dilakukan secara *purposive*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Informan yang sengaja dipilih oleh peneliti karena memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data peneliti. Penelitian ini berkaitan dengan bantuan PKH yang otomatis semua informan secara langsung terlibat dari awal sampai akhir dalam proses implementasi bantuan PKH. Selain itu peneliti juga berusaha mendapatkan informasi dari pihak yang mengawasi berjalannya Program Keluarga Harapan.

Adapun objek dalam penelitian ini, bagaimana proses Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Dari objek penelitian dapat diketahui seberapa efektifkah proses implementasi PKH. Kemudian dari objek penelitian ini dapat berkaitan dengan kontribusi Indonesia di mata dunia dalam mengurangi angka kemiskinan.

3.4 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri sedangkan panduan wawancara dan panduan observasi hanyalah alat bantu. Dengan demikian tugas seorang peneliti

adalah berfungsi dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2015:222).

Dalam melakukan penelitian kemudian dibantu juga dengan instrumen atau alat bantu penelitian yaitu dalam melakukan observasi yang menjadi instrumennya adalah alat tulis dan kamera, alat tulis digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting pada saat melakukan observasi dan kamera digunakan untuk mengambil foto atas fenomena yang terjadi dilapangan saat melakukan observasi. Lalu, dalam melakukan wawancara yang menjadi instrumennya adalah pedoman wawancara, alat perekam suara (*voice recorder*), alat tulis dan buku catatan. Kemudian untuk dokumentasi diperlukan kamera serta mesin fotocopy untuk menyalin berkas dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi dan wawancara serta dokumentasi (Sugiyono, 2015).

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik (cara) yang pertama kali digunakan dalam penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan jika jumlah responden tidak terlalu besar. Melakukan observasi

dalam kegiatan penelitian ada dua indera yang sangat vital dalam melakukan pengamatan yaitu telinga dan mata.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara secara langsung merupakan pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) terhadap responden atau informan untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi tidak kalah pentingnya dalam metode pengumpulan data yang lain, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data profil Kelurahan desa Padang Tikar data PKH di Kelurahan desa Padang Tikar 1 dokumentasi berupa gambar yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH di Kelurahan desa Padang Tikar 1 dan sebagainya

3.6 Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten sehingga menjadi suatu data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan.

Teknik menguji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan proses triangulasi. Menurut Sugiyono (2015: 330) triangulasi diartikan

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Menurut Sugiyono (2015: 330) triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama, seperti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi atas subjek penelitian. Sedangkan triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, seperti menggunakan Teknik pengambilan data dengan wawancara untuk menggali informasi dari subjek penelitian tau informan yang berbeda-beda.

3.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini analisa data kualitatif, yaitu dengan pengolahan atau dianalisis agar dapat mendeskripsikan dengan jelas bagaimana proses Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan desa Padang Tikar 1.

Huberman (dalam Sugiyono 2015, 246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Kubu Raya merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 84 meter diatas permukaan laut dan luas wilayahnya sebesar 8.492,1 km². Wilayah Kabupaten Kubu Raya berbatasan dengan wilayah lain seperti dibagian sebelah utara dengan Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak, sebelah timur dengan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau, sebelah selatan dengan Kabupaten Kayong Utara dan sebelah barat dengan Laut Natuna. Secara administrasi wilayah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 wilayah Kecamatan yaitu Batu Ampar (2.434,06 km²), Terentang (642,01 km²), Kubu (1.594,38 km²), Teluk Pakedai (334,05 km²), Sungai Kakap (585,14 km²), Rasau Jaya (211,34 km²), Sungai Raya (1.190,12 km²), Sungai Ambawang (1.087,69 km²) dan Kuala Mandor B (413,31 km²). Dari 9 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Kubu Raya terdapat 123 desa yang sah tercatat secara administrasi. Beberapa wilayah dari Kabupaten Kubu Raya terpisah oleh sungai dan lautan sehingga wilayah ini memiliki pulau sebanyak 43 kepulauan yang berpenghuni serta tidak berpenghuni.

Kabupaten Kubu Raya resmi berdiri dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 10 Agustus 2007 sehingga termasuk Kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kubu Raya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak kemudian Kabupaten ini secara resmi mengadakan pemilihan kepala daerah (Bupati) pada tanggal 25 Oktober 2008. Wilayah Kabupaten Kubu Raya terus berkembang setiap tahunnya, tercatat sampai

saat ini terdapat 622.217 jiwa yang terdiri atas 317.815 jiwa penduduk laki-laki dan 304.402 jiwa penduduk perempuan dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,15%. Penduduk terbanyak yang mendiami Kabupaten Kubu Raya terletak di Kecamatan Sungai Raya sebagai ibu kota Kabupaten dengan persentase sebesar 38,58%.

Perkembangan wilayah Kabupaten Kubu Raya menjadikan pemerintah secara tidak langsung harus mengisi badan pemerintahan dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Terdapat banyak faktor untuk melihat atau menilai kualitas individu manusia salah satunya dengan riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan juga menjadi salah satu indikator untuk menempatkan seseorang dalam pekerjaan dalam sebuah bidang sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang ada. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki jumlah pegawai negeri sipil dengan jumlah 4830 orang, terdiri dari perempuan sebanyak 2834 orang dan laki-laki sebanyak 1996 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Riwayat Pendidikan PNS Kabupaten Kubu Raya

No	Pendidikan Terakhir	Pria	Wanita	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	15	-	15
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11	1	12
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	373	334	707
4	Diploma I/Akta I	-	-	-
5	Diploma II/Akta II	189	259	448
6	Diploma III/Akta III	212	537	749
7	Diploma IV/S1/Sarjana	1035	1584	2619
8	S2/Pasca Sarjana	161	118	279
9	S3/Doktor/Ph.D	-	1	1
Jumlah/Total		1996	2834	4830

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kubu Raya 2022

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Batu Ampar

Kecamatan Batu Ampar merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Kubu Raya dengan luas daerah (2.434,06 km²) yang wilayahnya memiliki topografi cenderung datar dengan beberapa perbukitan kecil di sekitar. Kecamatan Batu Ampar berada diantara 0°11'48" Lintang Utara, 0°54'06" Lintang Selatan, dan 108°54'55" – 110°00'49" Bujur Timur. Kecamatan ini dialiri oleh beberapa sungai kecil dan saluran air yang berperan penting dalam aktivitas pertanian dan perikanan masyarakat setempat. Wilayah Kecamatan Batu Ampar berbatasan dengan wilayah lain seperti dibagian sebelah utara dengan Kecamatan Kubu dan Kecamatan Terentang, sebelah timur dengan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau, sebelah selatan dengan Kabupaten Kayong Utara dan sebelah barat dengan Selat Karimata. Kecamatan Batu Ampar juga memiliki beberapa pulau dengan total 17 pulau, terdapat 6 pulau berpenghuni dan 11 tidak berpenghuni. Wilayah Kecamatan Batu Ampar memiliki desa berjumlah 15 desa yaitu desa Tanjung Beringin, Batu Ampar, Teluk Nibung, Padang Tikar 1, Padang Tikar 2, Tasik Malaya, Sungai Besar, Sungai Jawi, Nipah Panjang, Ambarawa, Tanjung Harapan, Sungai Kerawang, Sumber Agung, Muara Tiga dan Medan Mas.

Kecamatan Batu Ampar menjadi salah satu daerah di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang dapat terus berkembang karena masih banyak wilayah dapat ditempati serta masih banyak sumber daya alam yang dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakatnya. Perkembangan ini dapat terlihat dari jumlah desa yang terus mengalami penambahan dari pemekaran desa di wilayah Kecamatan Batu Ampar. Perkembangan wilayah Kecamatan Batu Ampar menjadi tanggung jawab pejabat daerah di wilayah tersebut. Kantor Kecamatan Batu Ampar yang

menjadi pusat pemerintahan di wilayah Kecamatan Batu Ampar terdiri dari camat, sekcab, dan empat kepala seksi (kasi) yaitu kasi PEM, kasi telantik, kasi etbak dan kasi kemasyarakatan. Salah satu masalah yang dihadapi dari setiap wilayah yaitu kemiskinan, Kecamatan Batu Ampar juga berupaya membantu masyarakat bebas dari kemiskinan salah satunya dengan program bantuan dari BPBD dan bantuan bencana makanya disalurkan untuk bencana alam seperti kebakaran, banjir, dll. Selain dari sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mengembangkan wilayah, pendidikan bagi masyarakat juga dapat menjadi salah satu faktor wilayah berkembang. Pendidikan di wilayah Kecamatan Batu Ampar tergolong cukup baik, hal ini dapat dilihat dari data sebagai berikut:

Tabel 4.2 Riwayat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Batu Ampar

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Belum Sekolah	10555
2	Tidak Tamat SD	5963
3	Sekolah Dasar (SD)	10989
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4533
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3478
6	Diploma I/Akta I	-
7	Diploma II/Akta II	105
8	Diploma III/Akta III	140
9	Diploma IV/S1/Sarjana	324
10	S2/Pasca Sarjana	8
11	S3/Doktor/Ph.D	2
Jumlah/Total		36097

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Semester 2 Tahun 2022

4.3 Gambaran Umum Desa Padang Tikar 1

Desa Padang Tikar 1 merupakan salah satu desa dari wilayah Kecamatan Batu Ampar yang memiliki populasi sebanyak 4.297 orang terdiri dari 2.119 orang laki-laki dan 2.178 orang perempuan. Luas wilayah dari Desa Padang Tikar 1 memiliki luas wilayah 18,61 km². Perbatasan dari wilayah Desa Padang Tikar 1 dari sebelah utara dengan Desa Batu Ampar, sebelah timur Desa Sungai Raya, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Terentang dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna. Kondisi topografi dari Desa Padang Tikar 1 yaitu dataran rendah kemudian beberapa sungai seperti sungai Kapuas Kecil dan Terentang. Mayoritas masyarakat Desa Paadang Tikar 1 memiliki mata pencaharian seperti petani, nelayan, peternak dan pedagang. Desa Padang Tikar 1 terdiri dari enam dusun, 12 RW dan 24 RT. Dusun-dusun yang terdapat di Desa Padang Tikar 1 antara lain Dusun Patimura, Kota Laya, Baburazhak, Karya Bakti, Panglima dan Bintang Jaya.

Desa Padang Tikar 1 merupakan salah satu desa di Kecamatan Batu Ampar yang memiliki potensi untuk berkembang. Dibawah arahan dari Kecamatan Batu Ampar, Desa Padang Tikar 1 memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala desa, kepala urusan tata usaha, dan umum kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, serta seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayananan, dan mempunyai enam kepala dusun. Kantor desa berperan penting dalam mengembangkan wilayah desa dan menyelesaikan permasalahan yang ada, salah satunya masalah kemiskinan. Kantor Desa Padang Tikar 1 memiliki program bantuan BLTDD desa yang disalurkan setiap per-12 bulan. Salah satu usaha untuk terbebas dari kemiskinan adalah pendidikan, dengan pendidikan yang layak dapat membuat orang memiliki kesempatan untuk terlepas dari kemiskinan. Data yang

tersaji menunjukan masyarakat di Desa Padang Tikar 1 memiliki pendidikan tergolong cukup baik, hal ini dapat dilihat dari data sebagai berikut:

Tabel 4.3 Riwayat Pendidikan Masyarakat Desa Padang Tikar 1

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Belum Sekolah	1271
2	Tidak Tamat SD	1019
3	Sekolah Dasar (SD)	941
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	422
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	527
6	Diploma I/Akta I	-
7	Diploma II/Akta II	20
8	Diploma III/Akta III	21
9	Diploma IV/S1/Sarjana	73
10	S2/Pasca Sarjana	3
11	S3/Doktor/Ph.D	0
Jumlah/Total		4297

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Semester 2 Tahun 2022

BAB V

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG TIKAR 1
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

5.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Kebijakan menjadi salah satu komponen penting dari sebuah negara karena kebijakan menjadi salah satu bagian bagaimana negara berjalan. Kebijakan memiliki pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sehingga sebuah kebijakan perlu di implementasikan. Implementasi kebijakan punya beberapa tahapan atau proses sampai ditetapkan oleh pemerintah lalu dijalankan pada negara. Kebijakan publik dibentuk berdasarkan kebutuhan dari negara terutama masyarakat sebagai target dari kebijakan publik tersebut. Secara tidak langsung kebijakan menjadi media untuk menertibkan dan mengatur perilaku masyarakat. Kebijakan publik sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, dan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan publik yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu menghadirkan sebuah lembaga dengan tanggung jawab menyelenggarakan urusan di bidang sosial dalam negara. Kementerian Sosial merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab menyelenggarakan urusan di bidang sosial, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial. Kementerian ini memiliki peran penting dalam mengatur dan menyelenggarakan berbagai program dan

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan. Salah satu program yang dijalankan oleh Kementerian Sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. PKH merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dirancang untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Terdapat penegasan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan ini memberikan landasan hukum secara rinci terkait pelaksanaan PKH yang dirancang untuk memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin dengan beberapa syarat, seperti partisipasi dalam program kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, PKH tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Berkaitan dengan bantuan PKH pada pendidikan, terdapat kriteria komponen pendidikan yang mendapatkan bantuan yaitu anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, dan usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Selain mendapatkan hak yang diberikan oleh pemerintah, sebagai penerima manfaat PKH juga punya kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban penerima manfaat PKH pada fasilitas pendidikan tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun

2018 Tentang Program Keluarga Harapan BAB II Pasal 7 menyatakan “mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas tahun”. Penjelasan mengenai kewajiban yang harus diikuti oleh penerima manfaat PKH membuktikan bahwa negara sebagai pembuat kebijakan publik memastikan bahwa sebuah kebijakan yang dibuat tidak menjadi sia-sia dan dapat bermanfaat bagi negara dan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

Penelitian ini berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan salah satu dari upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan khususnya pada salah satu wilayah Provinsi Kalimantan Barat dimana studi kasus penelitian ini yaitu di Desa Padang Tikar 1, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.

Pada tahun 2024, jumlah masyarakat miskin di Desa Padang Tikar 1 tercatat sebanyak 397 orang, yang terdiri dari 180 laki-laki dan 217 perempuan. Ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan miskin lebih banyak dibandingkan laki-laki. Masyarakat miskin ini menghadapi berbagai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Program bantuan sosial seperti PKH dan bantuan non-PKH telah disalurkan untuk membantu mereka, meskipun belum seluruhnya menerima bantuan.

Dalam hal bantuan sosial, pada tahun 2024, terdapat 122 bantuan non-PKH yang dialokasikan untuk masyarakat miskin. Dari jumlah tersebut, hanya 10 bantuan yang berhasil tersalurkan, sedangkan 112 bantuan lainnya belum tersalurkan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam distribusi bantuan yang merata. Diharapkan perbaikan dalam sistem penyaluran dapat memastikan

bahwa seluruh masyarakat yang membutuhkan dapat menerima bantuan tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara bertahap.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn dimana merumuskan proses implementasi sebagai tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan. Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan pemikiran tentang model implementasi yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*, sebuah model implementasi yang menjelaskan kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel yang dimaksud oleh Van Meter dan Van Horn dalam mempengaruhi sebuah kebijakan yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, lingkungan (ekonomi, sosial, dan politik), dan sikap para pelaksana. Faktor-faktor tersebut dijadikan dasar sebagai pedoman wawancara dalam membahas penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan diantaranya adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, lingkungan (ekonomi, sosial, dan politik), dan sikap para pelaksana. Berdasarkan kejadian dilapangan masih terdapatnya kendala dalam implementasi dari sebuah kebijakan sehingga butuh

evaluasi atau perbaikan dari yang berwenang sehingga kebijakan dapat mencapai tujuan seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dipengaruhi beberapa faktor yang dapat diteliti, maka penelitian ini menjadikan faktor-faktor tersebut sebagai objek dari penelitian. Proses analisa yang dilakukan pada sebuah kebijakan publik menggunakan model implementasi dari pemikiran *Van Meter dan Van Horn* dengan mengaitkan keberhasilan kebijakan tersebut pada beberapa faktor atau variabel seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, lingkungan (ekonomi, sosial, dan politik), dan sikap para pelaksana. Analisa yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut digunakan pada objek penelitian yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Pembahasan lebih mengenai faktor atau variabel yang mempengaruhi kebijakan secara detail disajikan secara runtut sebagai berikut:

5.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Sebuah kebijakan dalam penerapannya memiliki tujuan serta fokus yang ingin dicapai. Pencapaian dari sebuah kebijakan dapat dikategorikan berhasil atau tidaknya dengan menerapkan parameter pada sebuah kebijakan publik. Standar membantu mengukur kinerja dan mengevaluasi sebuah kebijakan berjalan sesuai

rencana atau tidak. Dengan memiliki standar yang jelas, kita dapat memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain standar, kebijakan juga memiliki sasaran sebagai pemberi arah dan fokus pada hasil konkret yang ingin dicapai. Sasaran yang spesifik dan terukur memungkinkan pemantauan yang efektif dan memastikan bahwa kebijakan berdampak positif bagi masyarakat. Standar dan sasaran sebuah kebijakan menjadikan kebijakan publik dapat berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebuah kebijakan yang memiliki standar dan sasaran dalam penerapannya secara tidak langsung diuntut memiliki akuntabilitas. Pemerintah dapat dipertanggungjawabkan atas pencapaian atau ketidakberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan menggabungkan standar dan sasaran, masyarakat dan beberapa lembaga yang berwenang dapat memastikan bahwa kebijakan publik berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas yang dibangun dari standar dan sasaran kebijakan ini dapat memberikan efek yang baik bagi pemerintah salah satunya motivasi bagi para pemangku kepentingan untuk berkontribusi aktif dalam mencapai tujuan kebijakan. Selain itu, standar dan sasaran kebijakan yang disusun dapat menjadi landasan bagi koordinasi yang efektif antar berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, sehingga tercipta sinergi dan optimalisasi sumber daya. Komitmen yang dibangun pemerintah dalam menjalankan kebijakan menggunakan standar dan sasaran kebijakan juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah karena menunjukkan pemerintah secara serius dan profesional dalam menjalankan kebijakan.

Berhasil atau tidak sebuah kebijakan publik memiliki indikator yang dapat diukur dengan bergantung pada tujuan dan konteks dari kebijakan tersebut. Menggunakan indikator yang tepat dan terukur, pemerintah dapat secara objektif mengevaluasi kemajuan dan efektivitas sebuah kebijakan publik. Kemajuan dari sebuah kebijakan dapat terlihat ketika kebijakan berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan. Indikator juga dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dengan menentukan penghambat pencapaian target dan mencari solusi yang tepat. Mengarahkan sumber daya dan upaya ke arah yang paling efektif dalam rangka meningkatkan efektivitas dan dampak kebijakan tersebut juga dapat menjadi salah satu bentuk respon ketika kebijakan diukur dengan indikator yang tepat sehingga pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa kebijakan dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam menjalankan kebijakan berkaitan dengan bantuan PKH pada saat kondisi dilapangan akan dilaksanakan oleh Koordinator selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat. Koordinator dilapangan diberi kewenangan untuk menjalankan PKH sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar menjelaskan sebagai berikut:

“Dengan pembentukan kelompok kpm pkh dan pendampingan pkh. Pembentukan kelompok KPM PKH bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat, pemutakhiran data, monitoring penyaluran bantuan, pengembangan kelompok serta untuk tujuan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH”.

Berdasarkan observasi dari peneliti yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar menyampaikan informasi terkait tindakan yang dilakukan setelah sebuah keluarga dinyatakan memenuhi syarat

sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bantuan PKH. Kelompok KPM PKH masuk dalam semua kategori salah satunya yang menerima PKH untuk pendidikan bagi anak sekolah. Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat, pemutakhiran data, monitoring penyaluran bantuan, pengembangan kelompok serta untuk tujuan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH. Tujuan yang ingin di capai melalui pembentukan kelompok berkaitan dengan hak dan kewajiban KPM PKH sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Tujuan pembentukan kelompok KPM yang berkaitan dengan hak dari penerima PKH yaitu meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat, monitoring penyaluran bantuan dan pengembangan kelompok serta untuk tujuan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH. Peningkatan kemampuan keluarga dan pengembangan kelompok dapat di kaitkan dengan mendapatkan bantuan pada layanan kesehatan dan pendidikan atau kesejahteraan sosial. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan peluang sebuah individu dan keluarga untuk terbebas dari kemiskinan. Kemudian monitoring penyaluran bantuan tujuan ini berkaitan dengan hak KPM untuk mendapatkan bantuan PKH secara tepat jumlah dan tepat waktu. Tujuan terakhir yaitu penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH berkaitan dengan hak pendampingan PKH, dengan adanya pendampingan dari Koordinator PKH terhadap KPM PKH masalah terkait dengan bantuan PKH dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Selain berkaitan dengan hak, pembentukan kelompok KPM ini juga dapat berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh KPM bantuan PKH. Koordinator dapat terbantu dalam mengawasi dan memastikan KPM PKH

untuk mengikuti semua hal berkaitan dengan bantuan layanan kesehatan dan pendidikan atau kesejahteraan sosial. Selain itu terdapat salah tujuan yaitu pemutakhiran data, tujuan ini dapat berkaitan dengan verifikasi dan validasi data KPM bantuan PKH. Verifikasi dan validasi data diperlukan untuk meminimalisir bantuan tidak tepat sasaran. Peneliti juga mewawancarai pihak Kecamatan Batu Ampar berkaitan dengan data bantuan PKH yang tepat sasaran, beliau memberikan pernyataan bahwa:

“Peran Kecamatan Batu Ampar dalam memastikan bantuan PKH ini dengan memantau data dari Koordinator PKH apakah keluarga penerima manfaat sesuai dengan kriteria atau aturan yang berlaku”.

Perwakilan dari pihak Kecamatan Batu Ampar memberikan pernyataan bahwa mengupayakan bahwa PKH dapat tepat sasaran sesuai dengan kriteria atau aturan yang berlaku saat ini. Memantau serta memastikan penerima bantuan PKH yang tepat sasaran secara tidak langsung menyukseskan kebijakan publik yang dampaknya mengurangi kemiskinan. Angka kemiskinan yang menurun disertai peningkatan kualitas individu, dapat berdampak baik pada sebuah daerah atau wilayah tersebut. Beberapa hal tersebut yang mendorong pihak Kecamatan Batu Ampar bekerja sama dengan Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar terkait penerima bantuan PKH yang tepat sasaran termasuk bantuan PKH bagi anak sekolah. Selain pihak Kecamatan Batu Ampar, peneliti juga mewawancarai pihak Desa Padang Tikar 1 yang merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya. Pihak Desa Padang Tikar 1 memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Memastikan bantuan PKH dapat tepat sasaran untuk anak sekolah dengan desa memastikan siswa/siswi mempunyai kartu KIP, memastikan keadaan ekonomi atau penghasilan orang tua oleh kepala

wilayah anggota keluarga yang bukan berasal dari keluarga pegawai atau ASN”.

Perwakilan dari pihak Desa Padang Tikar 1 memberikan pernyataan terkait bantuan PKH yang diterima masyarakat di wilayah ini. Beliau menjelaskan bagaimana pihak Desa Padang Tikar 1 berupaya bantuan PKH dapat tepat sasaran. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memastikan bahwa siswa/siswi memiliki kartu KIP. Kemudian melihat keadaan ekonomi keluarga dengan memastikan di pihak keluarga tersebut bukan berasal atau bekerja sebagai ASN. Upaya yang dilakukan pihak desa cukup membantu untuk memastikan bahwa kebijakan PKH dapat tepat sasaran, karena kebijakan ini merupakan kebijakan jangka panjang untuk mengurangi angka kemiskinan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan perwakilan keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bantuan PKH, beliau memberikan pernyataan bahwa:

“Merasa terbantu, karna semua keperluan untuk anak sekolah dari perlengkapan sekolahnya seperti alat tulis, seragam sekolah dan lainnya yang berkaitan untuk sekolah”.

Beliau merupakan salah satu perwakilan KPM bantuan PKH untuk anak sekolah merasa bahwa bantuan PKH meningkatkan akses anaknya ke pendidikan. Dengan bantuan ini beliau tidak merasa khawatir karena keperluan yang berkaitan dengan sekolah anaknya sudah dibantu melalui PKH. Bantuan PKH pada pendidikan juga merupakan salah satu cara pemerintah untuk membuat anak-anak yang kurang mampu dapat terus bersekolah, sehingga anak-anak dapat fokus bersekolah serta orang tua ataupun wali dapat fokus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bantuan PKH yang berkaitan dengan pendidikan pasti memiliki hubungan dengan sekolah. Peneliti mewawancarai Kepala Sekolah MB.

AL – IHSAN sebagai salah satu pihak yang berkaitan dengan bantuan PKH pada layanan pendidikan, beliau menjelaskan bahwa:

“Anak yang menerima PKH ini bisa melanjutkan sekolahnya ini sudah hampir 90% sangat membantu dalam proses kegiatan belajarnya, membantu seragamnya maupun uang sakunya ada juga yang tidak bisa melanjutkan tapi kecil persentasenya kurang lebih 10% karena terkadang penerima PKH ini ibunya yang menerima jadi bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga seperti beli beras, beli minyak goreng, dan macam lainnya.”.

Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh Kepala Sekolah MB. AL – IHSAN bahwa bantuan PKH sudah sangat membantu murid-murid untuk melanjutkan pendidikan, namun ada beberapa KPM yang masih belum bisa memaksimalkan bantuan PKH untuk akses ke pendidikan anaknya. Beberapa dari KPM bantuan PKH pada pendidikan ini mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga uang bantuan PKH yang bertujuan untuk pendidikan dialih fungsikan sebagai pemenuh kebutuhan hidup. Anak dari KPM bantuan PKH yang tidak bisa melanjutkan pendidikan secara tidak langsung melepas kewajiban untuk menyelesaikan wajib belajar selama 12 tahun.

5.2.2 Sumber Daya

Menerapkan sebuah kebijakan publik tentunya membutuhkan sumber daya untuk memfasilitasi proses implementasi. Kebijakan publik yang konsepnya sangat baik dan terarah dapat gagal jika tidak didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang memadai begitu penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan publik apalagi kebijakan yang punya tujuan jangka panjang. Kebijakan publik yang tidak mampu di dukung dengan sumber daya dalam jangka waktu panjang memiliki kemungkinan besar untuk gagal bahkan sampai harus dihentikan.

Ketersediaan sumber daya ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara efisien dan efektif. Sebuah kebijakan publik dijalankan dengan sumber daya yang memadai dapat menyelesaikan tugas-tugas kebijakan lebih cepat, tepat, dan hemat biaya sehingga tercipta efisiensi dalam proses implementasi. Sumber daya yang memadai juga memungkinkan pelaksanaan program dan kegiatan kebijakan secara optimal, sehingga meningkatkan peluang tercapainya tujuan kebijakan. Memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan layak serta mengelolanya secara bertanggung jawab, dapat meningkatkan peluang keberhasilan kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menjalankan kebijakan publik hingga mencapai tujuannya merupakan prioritas penting dan harus didukung dengan sumber daya yang mumpuni. Dalam konteks kebijakan publik, sumber daya berkaitan dengan beberapa hal seperti sumber daya manusia, finansial, fisik atau peralatan dan kewenangan yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan publik. Sumber daya manusia meliputi staf atau personel yang terampil dan terlatih serta kesesuaian jumlah dengan beban kerja atau tugas-tugas dari implementasi kebijakan publik. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten sangat penting sehingga kebijakan dapat dijalankan dengan profesionalisme dan efisien. Sumber daya kedua yaitu finansial atau keuangan, meliputi dana yang cukup untuk membiayai semua aspek pelaksanaan kebijakan, mulai dari operasional hingga pengawasan. Sumber daya selanjutnya yaitu fisik atau peralatan seperti infrastruktur, peralatan, dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya terakhir yang tidak kalah pentingnya dalam implementasi kebijakan publik yaitu kewenangan sebagai

dasarannya untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah direncanakan. Sumber daya kewenangan meliputi data dan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan. Akses terhadap informasi yang memadai membantu pembuat kebijakan dalam memantau kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dalam menjalankan kebijakan publik, peneliti mewawancarai salah satu Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar menjelaskan sebagai berikut:

“Peralatan dan sumber daya sebagai koordinator PKH dimanfaatkan untuk menekankan dan mendampingi kepada keluarga penerima manfaat PKH agar bantuan PKH digunakan sebagian besar untuk keperluan anak sekolah yang bersangkutan”.

Berdasarkan pernyataan Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya beliau menjelaskan bahwa sumber daya yang diberikan oleh Kementerian Sosial digunakan untuk memastikan keberhasilan PKH. Dalam wawancara ini konteks yang dibicarakan adalah KPM yang menerima bantuan PKH pada pendidikan. Keluarga penerima manfaat bantuan PKH ditekankan serta didampingi untuk memanfaatkan bantuan PKH untuk keperluan sekolah, hal ini secara langsung berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh KPM yaitu memastikan anak penerima bantuan PKH ikut serta dalam wajib belajar 12 tahun. Proses untuk mendampingi KPM seperti mengadakan pertemuan dan berkoordinasi secara *online* juga menggunakan sumber daya yang sudah disediakan. Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar tidak menjelaskan secara rinci apa saja peralatan dan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan kebijakan publik PKH, namun beliau memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara bijak dan bertanggung jawab untuk mencapai keberhasilan dari PKH.

5.2.3 Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas merupakan salah satu variabel penting dalam menerapkan sebuah kebijakan publik karena hal ini dapat memfasilitasi koordinasi efektif antara berbagai entitas serta memastikan bahwa semua tindakan digunakan dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Komunikasi antar organisasi menjadi bagian yang penting karena hakikatnya manusia membutuhkan komunikasi untuk saling bersinergi, memastikan bahwa semua pihak berkomunikasi secara baik dapat membuat siapapun yang berpartisipasi memahami tujuan, standar, dan prosedur kebijakan, serta memungkinkan penyampaian informasi yang tepat waktu mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi kedepannya. Sinergisitas yang di hasilkan dari komunikasi yang baik memberikan efek bagi aktivitas atau agenda yang akan diadakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan publik. Penguatan aktivitas melalui komunikasi dan koordinasi yang baik membantu memastikan bahwa semua lembaga bekerja secara harmonis serta efisien. Dampak dari sinergisitas yang di bangun dengan baik ini memungkinkan respons cepat terhadap masalah yang muncul, serta penyesuaian strategi dan tindakan sesuai kebutuhan.

Penerapan komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas yang baik akan mendatangkan manfaat baik juga terhadap implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang efektif antara berbagai lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik dapat mengurangi risiko kesalahpahaman dan konflik sehingga semua pihak dapat bersinergi untuk mencapai tujuan dari kebijakan publik tersebut. Penguatan aktivitas melalui koordinasi yang terstruktur dan sinergi antar organisasi juga membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mencegah duplikasi

usaha, dan memastikan bahwa semua tindakan terkoordinasi dengan baik. Manfaat dari komunikasi yang kuat dan koordinasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberhasilan keseluruhan dalam implementasi kebijakan publik.

Sebuah tindakan apalagi yang dilakukan dalam jangka panjang hendaknya memiliki prinsip yang dapat beradaptasi dengan lingkungan, seperti komunikasi dan penguatan aktivitas harus dilakukan secara berkelanjutan, dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan kebijakan. Komunikasi dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam implementasi kebijakan publik dengan memiliki beberapa aspek dalam penerapannya, aspek pertama yaitu transmisi yang memiliki konsep mengacu pada proses penyampaian informasi tentang kebijakan dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana. Aspek transmisi menekan kejelasan informasi, memastikan bahwa semua pesan dan instruksi yang disampaikan antar organisasi jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh semua pihak terlibat sehingga semua pihak yang menjadi pelaksana kebijakan dapat memahami tujuan, sasaran, strategi dan program kebijakan. Setelah transmisi dilakukan dengan cukup baik selanjutnya komunikasi harus memiliki aspek konsistensi dengan mengacu pada tingkat kesesuaian antara pesan kebijakan yang disampaikan dan tindakan yang diambil dalam implementasi. Konsisten dalam komunikasi memungkinkan pertukaran informasi dan pembaruan terkait perkembangan kebijakan sehingga semua pihak selalu mendapatkan informasi terbaru dan dapat menyesuaikan tindakan mereka sesuai dengan situasi terkini. Aspek terakhir dalam komunikasi yaitu klarifikasi yang berarti sebuah proses penyelesaian keraguan dan pertanyaan selama implementasi kebijakan. Klarifikasi dapat dijadikan pemecah masalah

dalam pelaksanaan kebijakan serta dapat memberikan panduan dan interpretasi yang jelas tentang peraturan terkait kebijakan.

Sementara itu, penguatan aktivitas merujuk pada mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Mekanisme dan prosedur yang umum dilakukan yaitu pengembangan kapasitas kepada organisasi atau individu sehingga kedepannya individu atau organisasi dapat membangun sistem kerja menjadi lebih baik lagi berdasarkan evaluasi dari kegiatan yang sudah dikerjakan. Kemudian membangun motivasi dan komitmen kepada semua pihak yang terlibat juga dapat dilakukan sehingga kebijakan yang sudah menjadi sebuah program dapat dikerjakan dengan mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas bukan hanya sebatas pertukaran informasi dan pelatihan, tetapi juga mencakup berbagai elemen yang saling terkait untuk membangun kolaborasi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam implementasi kebijakan publik yang efektif. Dalam menjalankan kebijakan PKH, Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar selaku pelaksana menerapkan komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan yang di sampaikan sebagai berikut:

“Kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan pihak kecamatan dan desa terkait validasi data pemanfaat PKH ataupun dalam penyaluran bantuan PKH sehingga pemanfaat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya kemudian dilakukan pembentukan kelompok sebagai bentuk pendampingan dan koordinasi kepada penerima manfaat PKH ”.

Berdasarkan pernyataan Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar berkaitan dengan komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar sudah cukup baik dalam melakukan koordinasi atau komunikasi. Pernyataan tersebut dapat dijadikan landasan bahwa komunikasi yang

dilakukan bukan hanya secara vertikal atau hanya kepada koordinator pusat maupun penerima manfaat tetapi juga beberapa pihak salah satunya perangkat desa. Komunikasi yang dibangun bertujuan baik karena berkaitan dengan validasi data dari penerima PKH yang diperuntukan untuk masyarakat ekonominya tergolong belum mampu. Selain itu koordinasi juga membahas terkait penyaluran meliputi dari segi waktu serta pemanfaatan dari bantuan. Selain itu terdapat juga pembentukan kelompok sebagai cara untuk berkoordinasi yang baik dengan keluarga penerima manfaat PKH. Beberapa tindakan yang dilakukan Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar cukup baik dalam komunikasi sehingga dengan adanya komunikasi yang baik, aktivitas berkaitan dengan implementasi kebijakan dapat berjalan baik. Selanjutnya peneliti mewawancarai juga mewawancarai pihak Kecamatan Batu Ampar sebagai salah satu instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan bantuan PKH, berikut penjelasannya:

“Untuk memastikan bantuan PKH tepat sasaran dan tepat jumlah saat diterima maka bantuan itu disalurkan melalui pos biro juga dipanggil petugasnya jadi sehari dua hari petugas posnya, petugas PKH dipanggil untuk meminta data – data yang dialokasikan. Setelah itu diminta laporan dari mereka apakah bantuan itu telah disalurkan atau belum jadi untuk memastikan tepat waktu dan tepat jumlah saat diterima, jadi mereka harus melaporkan ke kita”.

Berdasarkan pernyataan pihak Kecamatan Batu Ampar berkaitan dengan bantuan PKH, terjalin komunikasi atau koordinasi yang baik dalam implementasi kebijakan PKH. Komunikasi ini bertujuan bantuan PKH dapat tepat sasaran sehingga penerima sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan bagi penerima bantuan PKH. Koordinasi yang dilakukan antara pihak Kecamatan Batu Ampar dan Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar membentuk sinergisitas sehingga implementasi dari

kebijakan PKH dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang sudah di atur melalui undang-undang. Pihak Kecamatan Batu Ampar juga memberikan pernyataan adanya laporan yang harus diserahkan dari Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar terkait status bantuan yang sudah diserahkan atau belum kepada keluarga penerima manfaat PKH. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Desa Padang Tikar 1 sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berkoordinasi dengan Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar, berikut pernyataan yang di sampaikan:

“Pihak desa selalu memantau pendamping PKH saat melakukan validasi data lalu kepala dusun juga mengecek serta memberikan informasi seputar PKH kepada keluarga penerima manfaat ”.

Pihak Desa Padang Tikar 1 memberikan konfirmasi bahwa adanya koordinasi atau komunikasi yang terbangun dengan Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar. Koordinasi ini dilanjutkan dengan memberikan bantuan sekaligus memantau Koordinator PKH saat melakukan validasi data kepada keluarga penerima manfaat. Aktivitas ini tentunya menguatkan sekaligus memastikan kebijakan PKH dapat tepat sasaran. Kemudian pihak Desa Padang Tikar 1 juga turut membantu memberikan informasi seputar PKH kepada keluarga penerima manfaat PKH mengenai bantuan PKH, informasi yang disebarkan salah satunya jadwal penerimaan bantuan PKH. Peneliti juga mewawancarai Kepala Sekolah MB. AL – IHSAN selaku pihak sekolah yang berhadapan langsung dengan murid yang menerima bantuan PKH. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Kepala Sekolah MB. AL – IHSAN, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Semenjak satu atau dua tahun ini tidak ada dari pihak PKH untuk meminta absen siswa/siswi yang menerima bantuan PKH, sehingga pihak sekolah tidak mengerjakannya lagi secara detail. Akibat yang ditimbulkan dari tidak adanya pengecekan beberapa siswa/siswi bantuan penerima PKH menganggap sepele kehadiran di sekolah ”.

Berdasarkan pernyataan pihak Kepala Sekolah MB. AL – IHSAN berkaitan dengan siswa/siswi yang menerima bantuan PKH, beliau cukup menyesalkan sikap dari siswa/siswi yang menganggap sepele kehadiran di sekolah karena tidak ada lagi pemeriksaan absensi dari Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar. Pernyataan dari Kepala Sekolah MB. AL – IHSAN mengindikasikan tidak adanya lagi komunikasi yang dibangun dari Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar. Tindakan yang dilakukan oleh Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar ini ternyata secara tidak langsung berdampak bagi implementasi kebijakan PKH bagi anak sekolah. Kehadiran juga menjadi salah satu faktor seorang siswa/siswi melakukan aktivitas akademik di sekolah. Pengumpuln absensi dari sekolah bagi penerima bantuan PKH kepada Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar salah satu cara untuk berkomunikasi sehingga aktivitas untuk memenuhi kewajiban bagi penerima bantuan PKH dapat berjalan baik.

5.2.4 Karakteristik Agen Pelaksana

Kebijakan muncul serta dapat terlaksana karena adanya individu atau organisasi yang melaksanakannya. Dalam kebijakan publik disebuah negara, individu yang terhimpun dalam sebuah organisasi atau lembaga disebut sebagai pemerintah. Pemerintah menjadi agen dalam muncul dan terlaksananya sebuah kebijakan publik. Sebagai agen pelaksana dari kebijakan publik, pemerintah hendaknya memiliki karakteristik yang baik sehingga individu dan organisasi yang melaksanakan kebijakan publik dapat mencapai tujuannya. Salah satu karakteristik agen pelaksana yang perlu diperhatikan adalah struktur organisasi. Struktur organisasi menentukan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi dalam organisasi. Struktur organisasi yang baik memiliki individu dengan pengetahuan,

keterampilan, dan pengalaman yang relevan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan. Selain itu terdapat juga budaya organisasi yang berkaitan dengan kultur kerja dari organisasi tersebut. Budaya organisasi dapat mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan yang mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Untuk memiliki agen pelaksana yang baik diperlukan sistem serta pelatihan dalam mengembangkan kapabilitas bagi agen pelaksana sehingga dapat dipastikan bahwa agen pelaksana memiliki karakteristik untuk mengatasi hambatan dalam implementasi dan mencapai keberhasilan kebijakan publik.

Variabel dari karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan publik jadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan, menjadi agen pelaksana yang baik tentunya mendatangkan manfaat yang baik juga dalam implementasi kebijakan publik. Manfaat yang signifikan dalam penerapan kebijakan publik yaitu agen pelaksana yang kompeten dan berpengalaman dapat menginterpretasikan dan menerjemahkan kebijakan dengan tepat, sehingga dapat memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai dengan efektif dan efisien. Karena adanya kapabilitas yang mumpuni dari agen pelaksana maka sumber daya yang sudah disediakan untuk implementasi kebijakan dapat dipakai dengan efisien, kapabilitas ini juga mesti didukung dengan budaya organisasi yang baik. Karakteristik agen pelaksana yang tepat adalah kunci untuk memastikan implementasi kebijakan publik berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

Membangun agen pelaksana yang baik dalam implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada satu unsur atau aspek, melainkan beberapa unsur yang saling berkaitan. Dimulai dengan individu yang bergabung dalam organisasi hendaknya memiliki kompetensi serta keahlian yang mumpuni. Dari individu yang

memiliki kapabilitas baik maka struktur organisasi dapat berisikan individu yang paham dengan tanggung jawab yang akan dikerjakan. Setelah itu barulah organisasi dapat memiliki sistem dan budaya kerja yang baik. Semua unsur yang saling berkaitan ini dapat menjadi karakteristik, karakteristik yang buruk secara tidak langsung menjadi penghambat dalam melaksanakan tanggung jawab saat mengimplementasikan kebijakan publik. Peneliti mewawancarai Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar sebagai salah satu agen pelaksana dalam menjalankan PKH untuk mengurangi angka kemiskinan, berikut pernyataan yang disampaikan oleh Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar:

“Melakukan pengecekan dan koordinasi langsung kesekolah dimana ada pemanfaat PKH yang berada disekolah tersebut. Memastikan bantuan PKH tersebut benar – benar diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH serta bantuan digunakan untuk keperluan anak bersekolah. Apabila pemanfaat PKH tidak memberikan manfaat PKH kepada anak maka kami akan melakukan teguran kepada penerima manfaat PKH”.

Berdasarkan observasi dari peneliti yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar menyampaikan informasi terkait pola kerja dalam menjalankan kewajiban sebagai Koordinator PKH. Dalam wawancara ini Koordinator PKH menjelaskan bagaimana pengawasan dan memastikan bantuan PKH dapat terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan. Sebagai agen yang berada langsung dilapangan dan sering berinteraksi dengan target dari kebijakan publik PKH, memastikan bantuan tepat sasaran dan tepat dalam penggunaannya merupakan tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan. Kemudian melakukan peneguran kepada penerima manfaat PKH yang tidak mengikuti aturan juga termasuk tanggung jawab bagi Koordinator PKH yang berada dilapangan. Tanggung jawab yang dikerjakan oleh Koordinator

PKH bisa dapat terlaksana ketika mereka dapat paham dengan kewajiban dan tujuan dari kebijakan publik PKH. Semua itu didapatkan dari pelatihan dan pola kerja yang dibangun antar kepengurusan PKH cukup baik sehingga Koordinator dapat bekerja menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

5.2.5 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Salah satu variabel yang cukup berpengaruh pada implementasi kebijakan ketika mengalami kenaikan atau penurunan adalah lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik secara langsung mempengaruhi konteks dimana kebijakan diimplementasikan dapat diterima oleh masyarakat. Lingkungan ekonomi dapat dikaitkan dengan kondisi sumber daya, tingkat inflasi, dan stabilitas moneter yang dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan serta target dari kebijakan. Lingkungan sosial dapat dikaitkan dengan nilai norma, nilai budaya, dan struktur sosial masyarakat dalam berpartisipasi atau menerima kebijakan. Lingkungan politik dapat dikaitkan dengan stabilitas politik, dukungan dari para pemangku kepentingan, dan dinamika kekuasaan sehingga mempengaruhi keberlanjutan dan legitimasi kebijakan publik.

Kebijakan publik yang ideal hendaknya berjalan dengan minim hambatan dan dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Melakukan analisa lalu mendapatkan solusi dari kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat bermanfaat bagi implementasi kebijakan. Salah satu manfaat yaitu meningkatnya efektivitas implementasi kebijakan karena lingkungan yang kondusif. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif bukan hanya sebatas kondisi eksternal yang ideal, tetapi juga merupakan hasil dari strategi dan upaya proaktif pembuat kebijakan dalam membangun koalisi, mengelola konflik, dan menciptakan kondisi yang

mendukung implementasi kebijakan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Secara tidak langsung kondisi yang kondusif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada sebuah kebijakan publik lalu menjadikan kebijakan dapat mencapai tujuan sehingga mendatangkan pandangan yang baik untuk keberlanjutan kebijakan.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik terbentuk dari beberapa unsur yang berkaitan. Dalam lingkungan ekonomi terdapat tingkat pendapatan masyarakat, distribusi sumber daya, tingkat inflasi, dan stabilitas moneter. Kemudian dalam lingkungan sosial unsur-unsur seperti norma sosial, nilai-nilai budaya, dan tingkat pendidikan masyarakat. Lingkungan politik juga memiliki unsur seperti struktur pemerintahan, sistem politik, dan dinamika kekuasaan. Memahami dan menganalisa memperhitungkan unsur-unsur ini membantu dalam merancang serta mengimplementasikan kebijakan yang dapat sesuai dengan konteks sehingga peluang keberhasilan dari kebijakan dapat meningkat. Peneliti mewawancarai Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar berkaitan dengan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik di wilayah saat menjalankan kebijakan PKH, berikut pernyataan yang disampaikan oleh Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar:

“Kondisi secara ekonomi dari internal sudah mencukupi untuk melaksanakan tugas, ekonomi dari eksternal yaitu penerima manfaat PKH merasa terbantu dengan adanya PKH. Secara sosial bantuan PKH direspon cukup baik karena tidak melanggar norma yang ada serta bantuan ini juga dinilai mendukung budaya menolong kepada yang lebih membutuhkan. Kondisi politik cukup baik karena tidak adanya hal-hal mempolitisasi bantuan PKH serta PKH juga didukung pemerintah setempat”.

Pernyataan yang disampaikan oleh Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar dapat disimpulkan bahwa kebijakan PKH dapat berjalan cukup baik. Kondisi lingkungan secara ekonomi dirasa baik karena dari internal Koordinator

sendiri sudah tercukupi untuk melaksanakan tugas lalu dari eksternal yaitu penerima manfaat PKH merasa terbantu karena kebijakan PKH sifatnya memberikan bantuan yang bermanfaat bagi masa depan bukan kebijakan yang menarik pajak ataupun membatasi aktifitas masyarakat. Lalu kondisi sosial juga tidak adanya pertentangan dengan norma yang ada, kebijakan ini mungkin juga dapat sejalan dengan konsep gotong royong posisi pemerintah dan masyarakat saling bahu membahu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Kondisi lingkungan politik juga dapat dikategorikan kondusif karena Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar dibantu oleh pejabat setempat, tidak dihalang-halangi saat menjalankan tugas mengurus bantuan PKH. Peneliti juga mewawancarai pihak Kecamatan Batu Ampar sebagai pihak yang dapat dikaitkan yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan secara politik, berikut pernyataan yang disampaikan Kecamatan Batu Ampar:

“Melakukan kerja sama dengan petugas PKH untuk mempermudah urusan perihal administrasi, kemudian menyurati desa untuk membantu peserta PKH dalam perihal administrasi serta memberikan dokumentasi data sesuai dengan keperluan. Untuk Padang Tikar satu sudah berjalan sesuai yang diharapkan artinya apa yang diinformasikan baik dalam melalui peran petugas PKH, petugas kantor posnya dengan penyalurannya sudah dikordasikan dan kegiatan itu berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan dan tidak ada masalah penyaluran PKH untuk Kecamatan Batu Ampar”.

Pihak Kecamatan Batu Ampar memberikan pernyataan dengan mendukung PKH untuk terus berjalan dengan baik. Dukungan ini dalam bentuk kelancaran dalam proses administrasi yang berkaitan dengan PKH. Sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan di wilayah Batu Ampar, pihak kecamatan juga memberikan instruksi kepada pihak desa salah satunya yaitu Desa Padang Tikar 1 untuk memberikan dukungan perihal administrasi maupun dokumentasi

terkait masyarakat di wilayah tersebut. Tindakan ini mengindikasikan kondisi lingkungan secara politik mendukung PKH mencapai tujuannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kondisi yang kondusif ini seharusnya menjadikan PKH dapat berjalan dengan minim hambatan. Peneliti juga mewawancarai pihak Desa Padang Tikar 1 selaku pihak yang memiliki wewenang di Desa Padang Tikar 1, berikut pernyataannya:

“Petugas pelayanan Desa Padang Tikar 1 selalu memberikan pelayanan untuk kebutuhan administrasi pemanfaat PKH dan Koordinator PKH”.

Pihak Desa Padang Tikar 1 selaku pemegang kekuasaan di wilayah Padang Tikar 1 memberikan pernyataan mendukung PKH untuk berjalan. Dukungan yang diberikan perihal administrasi kepada penerima manfaat PKH dan juga Koordinator PKH. Kondisi yang kondusif dengan adanya dukungan dari pihak pemegang kekuasaan seharusnya membuat PKH dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan aturan. Sikap yang menyatakan dukungan dari lembaga yang memiliki otoritas disebuah wilayah juga berdampak kepada tingkat kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir untuk membantu masyarakat. Peneliti juga mewawancarai salah satu masyarakat yang menerima bantuan PKH, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Masih dibantu dan jika persyaratannya kurang maka akan boleh melengkapi dihari berikutnya. Terkadang juga dibantu mengenai informasi seputar PKH dan bantuan PKH yang saya terima tidak ada di potong-potong”.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan bahwa beliau merasa terbantu dan merasa haknya terpenuhi sebagai penerima bantuan PKH. Sebagai masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan PKH, beliau merasa kebijakan ini sangat membantu dengan indikasi adanya keinginan untuk melengkapi prasyarat sebagai penerima

kebijakan dan menerima informasi mengenai kebijakan. Selain itu beliau merasa pemerintah di wilayah tersebut benar-benar membantu karena bantuan diterima secara utuh sesuai dengan aturan yang berlaku. Kondisi ini tentunya termasuk efek dari lingkungan ekonomi, sosial dan politik ketika kebijakan diterapkan. Antusias masyarakat dalam menanggapi kebijakan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam studi kasus ini kebijakan yang diimplementasikan adalah PKH yang berkaitan dengan anak sekolah untuk mengurangi angka kemiskinan. Semakin banyak masyarakat dengan kriteria yang sudah ditentukan berpartisipasi, maka kedepannya Indonesia perlahan dapat mengurangi angka kemiskinan dengan salah satu cara yaitu meningkatkan kualitas pendidikan.

5.2.6 Sikap Para Pelaksana

Pelaksana menjadi salah satu variabel yang diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik. Fokus perhatian dari para pelaksana yaitu sikap dalam menjalankan kebijakan publik. Pelaksana yang dimaksud adalah seluruh individu yang ada di dalam lembaga khususnya pada pemerintahan. Sebuah lembaga yang beranggotakan orang dengan sikap yang baik dapat mempengaruhi pola kerja, sistem yang dibuat sampai hasil dari apa yang dikerjakan. Pemerintah sebagai salah satu organisasi yang besar dengan banyak struktur dan anggota harus memiliki sistem yang baik untuk mengakomodir individu yang ada didalamnya. Pemberian pelatihan atau bimbingan kepada individu yang ada didalam pemerintahan jadi salah satu solusi untuk menciptakan pelaksana yang mumpuni saat merumuskan dan mengerjakan kebijakan publik.

Memiliki pelaksana dengan sikap yang baik dapat mendatangkan manfaat pada implementasi kebijakan publik. Para pelaksana kebijakan publik yang

memiliki sikap yang baik dapat meningkatkan peluang keberhasilan implementasi kebijakan, memberikan dampak baik yang optimal bagi masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya jika sikap para pelaksana dinilai tidak baik atau negatif maka dapat menghambat implementasi kebijakan dan menurunkan peluang keberhasilannya sehingga pemerintah juga dapat mendapatkan efek negatif berupa inefisiensi sumber daya sampai kekecewaan publik terhadap kebijakan.

Sikap baik bagi para pelaksana bukan hanya dapat menguntungkan kebijakan tetapi juga lembaga dan diri sendiri. Sikap yang baik atau positif terdiri dari dedikasi, komitmen, integritas, profesional, terbuka dan adaptif. Semua sikap baik yang telah disebutkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Efektivitas dapat terjadi karena pelaksana yang proaktif dan kreatif dapat menemukan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan. Selain itu efektivitas juga hadir dari kolaborasi dan koordinasi melalui kerja sama dengan pihak-pihak yang mendukung kebijakan publik terlaksana. Masyarakat yang kebanyakan sebagai target dari implementasi kebijakan publik juga merasa pelaksana yang memiliki sikap baik dapat dipercaya akuntabilitas dan transparansinya. Membangun sikap yang baik bagi para pelaksana bukan hanya dengan menciptakan sistem atau standar aturan dan memiliki pemimpin berkualitas tapi juga perlu adanya kesadaran bersama dari pihak pelaksana sebagai individu yang sudah diberikan tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan publik. Peneliti mewawancarai Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar yang merupakan bagian dari pelaksana kebijakan publik, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut:

“Kami sebagai koordinator PKH berkomitmen menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dengan menunjukan sikap yang berintegritas dan tindakan konsisten selaras dalam komitmen jujur dan tanggung jawab terhadap PKH”.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Koordinator Kecamatan Batu Ampar memiliki usaha untuk menunjukan sikap yang baik dalam melaksanakan kebijakan publik. Memiliki komitmen dalam menjalankan tugas dengan landasan aturan yang berlaku. Kemudian menunjukan sikap integritas, konsisten, jujur dan bertanggung jawab juga dilakukan dalam menjalankan tugas sebagai Koordinator PKH. Sikap yang berusaha untuk dijaga dan dilakukan oleh Koordinator PKH dapat berdampak pada implementasi kebijakan. Sikap yang baik dari pelaksana ini berdampak bagi kebijakan, mulai dari target kebijakan yang dapat tepat sasaran sampai mengawasi penerima manfaat mendapatkan hak dan melaksana kewajiban dari bantuan PKH. Selain itu dalam mengelola sumber daya dengan alokasi untuk menjalankan kebijakan digunakan semestinya sesuai aturan bukan digunakan demi kepentingan pribadi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Bersumber dari pembahasan terkait Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dapat diambil kesimpulan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan merupakan salah satu variabel atau faktor berkaitan dengan sistem kebijakan yang berjalan sesuai dengan landasan aturan.
2. AL – IHSAN selaku pihak yang berkaitan dengan anak sekolah penerima bantuan PKH. Hal yang disampaikan oleh pihak sekolah menjadi indikasi bahwa ada beberapa KPM PKH yang tidak menjalankan kewajibannya.
3. Sumber daya yang diberikan untuk memaksimal tanggung jawab menjalankan PKH sesuai dengan aturan.
4. Komunikasi yang dibangun oleh Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar dinilai cukup baik karena adanya komunikasi atau koordinasi yang dibangun dengan pihak Kecamatan Batu Ampar dan Desa Padang Tikar 1 terkait validasi data dan penyaluran bantuan keluarga penerima manfaat PKH.
5. Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar melakukan pengawasan dan memastikan bantuan PKH dapat terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan.

6. Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar 1 memiliki usaha untuk menunjukkan sikap yang baik dalam melaksanakan kebijakan publik. Memiliki komitmen dalam menjalankan tugas dengan landasan aturan yang berlaku, dan menunjukkan sikap integritas, konsisten, jujur, bertanggung jawab juga dilakukan dalam menjalankan tugas sebagai Koordinator PKH.

6.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian diatas, maka ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Memperbaiki sistem pendampingan atau pengawasan kepada keluarga penerima manfaat PKH terutama yang mendapatkan bantuan bagi anak sekolah. Bantuan bagi anak sekolah merupakan bantuan dengan jangka waktu yang cukup panjang selama 12 tahun, sehingga sangat disayangkan bantuan disalah gunakan bahkan yang sudah mendapatkan bantuan PKH tidak melanjutkan pendidikan.
2. Membangun kembali komunikasi dengan pihak sekolah terkait pengawasan terhadap siswa atau siswi penerima bantuan PKH. Tidak adanya pengawasan dari pihak Koordinator PKH menyebabkan beberapa siswa atau siswi penerima bantuan PKH menganggap sepele kehadiran, sikap ini jelas berpengaruh terhadap proses akademik yang sedang dijalani.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan dari keseluruhan penelitian yang sudah dikerjakan, maka ada beberapa keterbatasan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi berupa data terkait kondisi bantuan PKH bagi anak sekolah di wilayah Desa Padang Tikar 1. Data yang dimaksud berupa laporan atau evaluasi terkait keluarga penerima manfaat PKH dari pihak Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar maupun pihak Sekolah MB. AL – IHSAN.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memaksimalkan jumlah partisipan atau informan dalam wawancara sehingga dapat memperkuat hasil penelitian terkait Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Tikar 1.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdoellah, Awan Y., Yudi Rusfiana. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Dewi, Dian Suluh K. 2022. Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses Implementasi dan Evaluasi. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI). Yogyakarta.
- Ginting, Rosalina dan Noor, Munawar. 2015. Kebijakan Publik. Univ. PGRI Semarang Press. Semarang.
- Hermana, Dody., Aceng Ulumudin., dan Dodi Yudiardi. 2019. Kebijakan Publik. Universitas Garut. Garut.
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Universitas Negeri Gorontalo Press. Gorontalo.
- Khaidir, Afriva. 2017. Pengantar Analisis Kebijakan Publik dan Implementasinya Dalam Bidang Pendidikan. Program Scheme for Academic Mobility and Exchange (SAME).
- Marwiyah, Siti. 2023. Kebijakan Publik Era Globalisasi. Repository UPM. Probolinggo.
- Meutia, Intan Fitri. 2013. Analisis Kebijakan Publik. AURA (CV. Anugrah Utama Raharja). Lampung.
- Mustari, Nuryanti. 2015. Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Leutikaprio. Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2009. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2015. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Purwanto, Erwan Agus. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah – Masalah Sosial. Gaya Media. Yogyakarta.
- Ravyansah., Sukarman Purba., Bambang Irawan., Alfansyah Fathur., Eka purnama., Kadek wiwin., Ni Wayan Ari Sudiartini., Abd Haris., Suwardi., M Doddy S A., Dian Sari. 2022. Kebijakan Publik. PT. Global Eksekutif Teknologi.

- Rodiyah, Isnaini., Ilmi Usrotin Choiriyah., dan Hendra Sukmana. 2022. Buku Ajar Kebijakan Publik. UMSIDA Press. Sidoarjo.
- Sugiyono. 2015 *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Suharto, Edi. 2009.
- Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan). Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Taufiqurakhman. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Buku Kita.
- Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi. Media Pressindo. Jakarta.

Jurnal, Undang-Undang, Website, dll:

- Antoro, Hajar Hari. 2015. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dibidang Pendidikan Di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Adminisrasi Negara Volume 4, Nomor 4.
- Desrinelti., Maghfirah Afifah., Nurhizrah Gistituati. 2021. Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. Journal IICET, Vol. 6, No. 1, 2021, pp. 83-88.
- Fahturrahman, M. 2016. Faktor Bikrokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik. TARBAWI Volume 2. No. 02, Juli, 2442-8809.
- Hasan, Nurul F. 2017. Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan (Studi Kasus pada Siswa Peserta PIP dari Keluarga Peserta PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo). Jurnal Program Studi PGMI, Volume 4, Nomor 1, 2442-3661.
- Hia, Evan N., Matias Siagian., dan Nurman Achmad. 2021. Implementasi Family Development Session Program Keluarga Harapan. PERSPEKTIF, 10 (1) (2021): 128-139, DOI: 10.31289.
- Mursalim, Siti Widharetno. 2017. Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi.
- Najidah, Nurul., Hesti Lestari., dan MS. 2019. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. E-Jurnal UNDIP.

- Purba, Yohanna Florida. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor. Repositori USU.
- Restianti, Ayu. 2017. Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH). Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1, no. 2 (2017): 405-426.
- Yacoub, Yarlina. 2012. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal EKSOS, Volume 8, Nomor 3, 176-185. ISSN 1693 – 9093.
- Yuningsih, Rahmi. 2014. Analisis Segitiga Kebijakan Kesehatan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR, Vol. 5, No. 2 (2014).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang, Kementerian Sosial.
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang, Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2022. Perhitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia. Badan Pusat Statistik, 2502-7484.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya. 2023. Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, 2549-8886.
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. 2022. Data Agregat Kependudukan Semester II 2022. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
- United Nations, Sustainable Development. 2023. Goal 1: End poverty in all its forms everywhere. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/>.
- DataIndonesia.id. 2023. Data Tingkat Kemiskinan di Asean 2022, Indonesia Urutan Berapa?.<https://dataindonesia.id/varia/detail/data-tingkat-kemiskinan-di-asean-2022-indonesia-urutan-berapa>

LAMPIRAN

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG TIKAR 1 KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Lampiran 1. Pendoman Wawancara

Jadwal Wawancara

Tanggal / Hari :

Pukul :

Identitas Informan

Nama :

Tempat /Tanggal Lahir :

Alamat :

Umur :

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Pertanyaan Untuk Kepala Camat dan Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar, Pemerintah Desa Padang Tikar 1 dan Kepala Sekolah dan Masyarakat yang menerima bantuan PKH :

A. Standar dan Sasaran Kebijakan

1. Bagaimana Standar dan Sasaran Kebijakan pembentukan kelompok KPM PKH dan pendampingan PKH dapat meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat serta mendukung pemutakhiran data, monitoring penyaluran bantuan, dan pengembangan kelompok untuk penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)?

2. Bagaimana Standar dan Sasaran Kebijakan peran Kecamatan Batu Ampar dalam memastikan bahwa keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan kriteria atau aturan yang berlaku, melalui pemantauan data dari Koordinator PKH?
3. Bagaimana Standar dan Sasaran Kebijakan desa memastikan bahwa bantuan PKH untuk anak sekolah dapat tepat sasaran, dengan memastikan siswa/siswi memiliki kartu KIP dan memverifikasi keadaan ekonomi atau penghasilan orang tua, terutama yang bukan berasal dari keluarga pegawai atau ASN?
4. Bagaimana Standar dan Sasaran Kebijakan bantuan PKH berkontribusi pada kelanjutan pendidikan anak penerima, khususnya dalam mendukung kebutuhan seperti seragam, uang saku, dan kegiatan belajar, serta apa yang menjadi kendala bagi sebagian kecil penerima yang tidak dapat melanjutkan sekolah?
5. Bagaimana Standar dan Sasaran Kebijakan bantuan yang diterima dari PKH membantu memenuhi keperluan sekolah anak, seperti perlengkapan sekolah, alat tulis, dan seragam, serta mendukung kelancaran pendidikan mereka?

B. Sumber Daya

1. Bagaimana peran sumber daya dan peralatan yang dimiliki oleh koordinator PKH dalam memastikan bahwa bantuan PKH digunakan dengan efektif, terutama untuk keperluan pendidikan anak-anak penerima manfaat?

C. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

1. Bagaimana Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas antara pihak kecamatan, desa, dan lembaga terkait dalam validasi data penerima manfaat PKH dan penyaluran bantuan dapat memperkuat komunikasi antar organisasi, serta bagaimana pembentukan kelompok pendampingan mendukung penguatan aktivitas bagi penerima manfaat PKH?
2. Bagaimana Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas, seperti petugas pos dan petugas PKH, dalam memastikan penyaluran

bantuan PKH tepat sasaran dan tepat jumlah, serta bagaimana penguatan aktivitas pelaporan untuk memastikan bantuan disalurkan dengan tepat waktu?

3. Bagaimana Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas, pihak desa, melalui peran pendamping PKH dan kepala dusun, melakukan komunikasi antar organisasi dalam memantau validasi data dan memberikan informasi terkait PKH kepada keluarga penerima manfaat, serta bagaimana hal ini dapat menguatkan aktivitas pelaksanaan program tersebut?
4. Bagaimana Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas terkait kurangnya komunikasi antara pihak PKH dan sekolah mengenai absensi siswa/siswi penerima bantuan PKH mempengaruhi disiplin kehadiran mereka, dan apa langkah yang perlu diambil untuk memperkuat koordinasi antar organisasi guna meningkatkan pengawasan dan penguatan aktivitas pendidikan?

D. Karakteristik Agen Pelaksana

1. Bagaimana Karakteristik Agen Pelaksana dalam melakukan pengecekan dan koordinasi langsung ke sekolah untuk memastikan bantuan PKH benar-benar diterima oleh keluarga penerima manfaat dan digunakan sesuai dengan keperluan anak bersekolah, serta apa langkah yang diambil jika bantuan tidak digunakan dengan tepat?

E. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan politik di lingkungan penerima manfaat PKH berkontribusi pada efektivitas bantuan, serta bagaimana respons masyarakat terhadap bantuan PKH dalam hal ekonomi, norma sosial, dan dukungan dari pemerintah setempat?
2. Bagaimana kerjasama antara petugas PKH, petugas kantor pos, dan pemerintah desa di Kecamatan Batu Ampar dalam mempermudah administrasi dan penyaluran bantuan PKH dapat menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran program, serta bagaimana hal ini mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, dan politik di lingkungan setempat?

3. Bagaimana peran lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam memastikan proses pemberian bantuan PKH berjalan lancar, termasuk dalam hal kelengkapan persyaratan dan transparansi penyaluran bantuan tanpa adanya pemotongan?

F. Sikap Para Pelaksana

1. Bagaimana sikap berintegritas, konsistensi, dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh para pelaksana PKH, khususnya koordinator PKH, dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memastikan keberhasilan program?

Lampiran 2. Wawancara Kecamatan Batu Ampar



Lampiran 1. Kantor Kecamatan Batu Ampar



Lampiran 2. Wawancara Desa Padang Tikar 1



Lampiran 3. Kantor Desa Padang Tikar 1



Lampiran 4. Wawancara Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar



Lampiran 5. Kantor Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar



Lampiran 6. Wawancara Penerima Manfaat PKH**Lampiran 7. Wawancara Sekolah MB. AL – IHSAN****Lampiran 8. Sekolah MB. AL – IHSAN**

Lampiran 9. Surat Izin Penelitian Kantor Kecamatan Batu Ampar



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PERCEPATAN APK**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nasution, Pontianak 78124, Telp/FAX: 0561-749188, Kotak Pos 1049
Surel: info@untan.ac.id, Laman: <http://www.fisip.untan.ac.id>

Nomor : 1098 / UN 22.5/DI, 16/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Mohon Izin Penelitian Mahasiswa

Yth. Kepala Kantor Kecamatan Batu Ampar
Di – Batu Ampar

Dengan hormat kami beritahukan bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura :

Nama : TEGUH PRINATORO
NIM : E1012181020
Jurusan / Prodi : Ilmu Administrasi / Ilmu Administrasi Publik
Alamat / HP : Jl. Sungai Kakap Komp. Villa Permata Alya No. 10 / 085753892958

Akan mengadakan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul " Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Tikar I Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat" yang merupakan syarat mahasiswa sebelum yang bersangkutan dinyatakan LULUS Sarjana (Program S-1).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Bapak/Ibu berkenan kiranya memberikan ijin dan bantuan seperlunya, guna pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

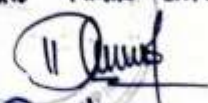

An. Camat Batu Ampar
ALFAN, SKM, M. Kes
Temp. 19680616/1995031007


Pontianak, 24 Januari 2024
Wakil Dekan I,
Dr. Evieta, S.Sos, M.Si
NIP. 197906272005012002

Lampiran 10. Surat Tugas Penelitian Kantor Kecamatan Batu Ampar

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PERCEPATAN APK Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124, Tlp/FAX: 0561-740188, Kotak Pos 1049 Surel : fsisp@untan.ac.id ; Laman: http://www.fsip.untan.ac.id
SURAT TUGAS Nomor : 1097 /UN22.5/ DL.16/2024		
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Memberikan Tugas Kepada Mahasiswa :		
Nama	:	TEGUH PRINATORO
NIM	:	E1012181020
Jurusan / Prodi	:	Ilmu Administrasi / Ilmu Administrasi Publik
Alamat /HP	:	Jl. Sungai Kakap Komp. Villa Permata Alya No. 10 / 085753892958
Keperluan	:	Melakukan Penelitian Lapangan Dalam Rangka Penulisan Skripsi
Lokasi	:	Desa Padang Tikar I
Tugas tersebut diterbitkan mulai tanggal 24 Januari 2024 s/d selesai. Berhubung dengan hal tersebut, kepada yang berwenang diharapkan memberikan izin dan bantuan seperlunya.		
		Pontianak, 24 Januari 2024 Wakil Dekan I,  Dr. Evieta, S.Sos, M.Si NIP. 197906272005012002
Mengetahui :		 
1. <i>Mr. Came Batu Ampar, Akcom</i> ALFIANY, SKM, M.Pd		
2.		
Catatan : Surat Tugas Ini Segera Dikembalikan Kepada Fakultas Setelah Selesai Penelitian.		

Lampiran 11. Surat Izin Penelitian Kantor Desa Padang Tikar 1

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PERCEPATAN APK Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124, Tlp/FAX: 0561-740188, Kotak Pos 1049 Surel : fsis@untan.ac.id , Laman: http://www.fsis.untan.ac.id
Nomor : 1058 /UN 22.5/DL.16/2024 Lampiran : 1 (satu) lembar Hal : Mohon Izin Penelitian Mahasiswa	
Yth. Kepala Kantor Desa Padang Tikar 1 Di – Padang Tikar	
Dengan hormat kami beritahukan bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura :	
Nama : NIM : Jurusan / Prodi : Alamat / HP :	TEGUH PRINATORO E1012181020 Ilmu Administrasi / Ilmu Administrasi Publik Jl. Sungai Kakap Komp. Villa Permata Alya No. 10 / 085753892958
Akan mengadakan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul " Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Tikar I Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat" yang merupakan syarat mahasiswa sebelum yang bersangkutan dinyatakan LULUS Sarjana (Program S-1).	
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Bapak/Ibu berkenan kiranya memberikan ijin dan bantuan seperlunya, guna pelaksanaan penelitian tersebut.	
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.	
 a.n. Sekretaris Desa PADANG TIKAR SATU  Dewi Indakani	Pontianak, 24 Januari 2024 Wakil Dekan I,  Dr. Etya, S.Sos, M.Si NIP. 197906272005012002

Lampiran 12. Surat Tugas Kantor Desa Padang Tikar 1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PERCEPATAN APK
 Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124, Tlp/FAX: 0561-740188, Kotak Pos 1049
 Surel: fisip@untan.ac.id, Laman: <http://www.fisip.untan.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 1071/UN22.5/ DL.16/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Memberikan Tugas Kepada Mahasiswa :

Nama	: TEGUH PRINATORO
NIM	: E1012181020
Jurusan / Prodi	: Ilmu Administrasi / Ilmu Administrasi Publik
Alamat /HP	: Jl. Sungai Kakap Komp. Villa Permata Alya No. 10 / 085753892958
Keperluan	: Melakukan Penelitian Lapangan Dalam Rangka Penulisan Skripsi
Lokasi	: Desa Padang Tikar I

Tugas tersebut diterbitkan mulai tanggal 24 Januari 2024 s/d selesai.

Berhubung dengan hal tersebut, kepada yang berwenang diharapkan memberikan izin dan bantuan seperlunya.

Pontianak, 24 Januari 2024
 Wakil Dekan I,

Dr. Elvita, S.Sos, M.Si
 NIP. 197906272005012002

Mengetahui :

1. a.n. Sekretaris Desa Padang
Tikar Satu


2. Desa Padang Tikar I


Catatan :
 Surat Tugas Ini Segera Dikembalikan Kepada Fakultas Setelah Selesai Penelitian.

Lampiran 13. Surat Persetujuan Melaksanakan Penelitian

78385

Padang Tikar, 5 Februari 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA^A
KECAMATAN BATU AMPAR
 Jalan Baburazak Barat Nomor. 18/F
 Padang tikar

Nomor : 000.5.14.4 / 035 /Kesra
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Mengizinkan Mahasiswa Melaksanakan Penelitian**

Yth: REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Rektor Universitas Tanjungpura Nomor : 1098/UN 22 5/DL. 16/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Mohon Izin Penelitian Mahasiswa yang akan mengadakan penelitian untuk penyusunan skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada prinsipnya kami tidak keberatan dan mengizinkan Mahasiswa atas nama:

Nama : Teguh Prinatoro
 NIM : E1012181020
 Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi / Ilmu Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Lingkungan Kecamatan Batu Ampar (Desa Padang Tikar Satu).

Demikian surat ini dibuat dan disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

CAMAT BATU AMPAR,



FAJRI MUSLIM, SP.MM
 NIP.197011251992031008